PEMERINTAH
KABUPATEN
TRENGGALEK

RENSTRA

DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

TAHUN 2025-2029



BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, perlu menjabarkannya kedalam rencana strategis perangkat daerah;

b. bahwa rencana strategis perangkat daerah merujuk pada tujuan dan sasaran rencana pembangunan jangka menengah daerah serta program dan kebijakan yang lebih luas, sehingga setiap tingkatan pembangunan terintegrasi dan saling mendukung;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 135);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 142);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 143);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

(2) Tujuan ditetapkannya Renstra Perangkat Daerah adalah untuk mewujudkan perencanaan pembangunan Perangkat Daerah yang sinergis dan terpadu.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah yang disusun merupakan penjabaran program RPJMD dan bersifat indikatif yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Pasal 4

(1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun sesuai dengan sistematika sebagai berikut:
   a. bab I berisi tentang pendahuluan;
   b. bab II berisi tentang gambaran pelayanan, permasalahan, dan isu strategis perangkat daerah;
   c. bab III berisi tentang tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan;
   d. bab IV berisi tentang program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
   e. bab V berisi tentang penutup.

(2) Dokumen Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan urutan sebagai berikut:
   a. Dinas Pendidikan;
   b. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
   c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
   d. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan;
   e. Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran;
   f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

g. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
h. Dinas Pertanian dan Pangan;
i. Dinas Lingkungan Hidup;
j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
k. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
l. Dinas Komunikasi dan Informatika;
m. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan;
n. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
o. Dinas Pemuda dan Olahraga;
p. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
q. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
r. Dinas Peternakan dan Perikanan;
s. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
t. Sekretariat Daerah;
u. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
v. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
w. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
x. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
y. Inspektorat;
z. Kecamatan Trenggalek;
aa. Kecamatan Panggul;
bb. Kecamatan Suruh;
cc. Kecamatan Durenan;
dd. Kecamatan Pogalan;
ee. Kecamatan Watulimo;
ff. Kecamatan Tugu;
gg. Kecamatan Dongko;
hh. Kecamatan Kampak;
ii. Kecamatan Munjungan;
jj. Kecamatan Pule;
kk. Kecamatan Gandusari;
ll. Kecamatan Bendungan;
mm. Kecamatan Karangan; dan

nn. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

a. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 39) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 42) dinyatakan berakhir periodesasinya; dan
b. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 48 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 Nomor 13) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum dilakukan perubahan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 19 September 2025
BUPATI TRENGGALEK,
TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 19 September 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
TTD

EDY SOEPRIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2025 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SRI AGUSTIANI
NIP. 19671223 199203 2 004

LAMPIRAN XIX
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS

DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Sebagaimana tertuang dalam pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perangkat Daerah Menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta perangkat perundangan lainnya merupakan upaya pemerintah dalam merencanakan pembangunan secara lebih efektif dan efisien. Sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014 Pasal 151 Ayat 1 bahwa “Perangkat Daerah menyusun rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra PD memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM daerah dan bersifat indikatif”. Selain itu Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 7 menetapkan ketentuan umum mengenai Renstra Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu satuan perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis urusan perindustrian, ketenagakerjaan dan

transmigrasi serta menyelenggarakan urusan pemerintahan lainnya di bidang terkait. Fungsinya meliputi penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pelaksanaan kegiatan, evaluasi, pelaporan, dan administrasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan industri, penyerapan tenaga kerja dan penempatan transmigrasi.

Dalam kaitan dengan dokumen perencanaan lainnya, maka Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2029 disusun dengan berpedoman pada dokumen perencanaan yang stratanya lebih tinggi dalam artian dokumen induk dari perencanaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek, seperti RPJMD Kabupaten Trenggalek tahun 2025-2029 dan dokumen perencanaan lain yang bersifat vertikal seperti dokumen perencanaan nasional dan provinsi.

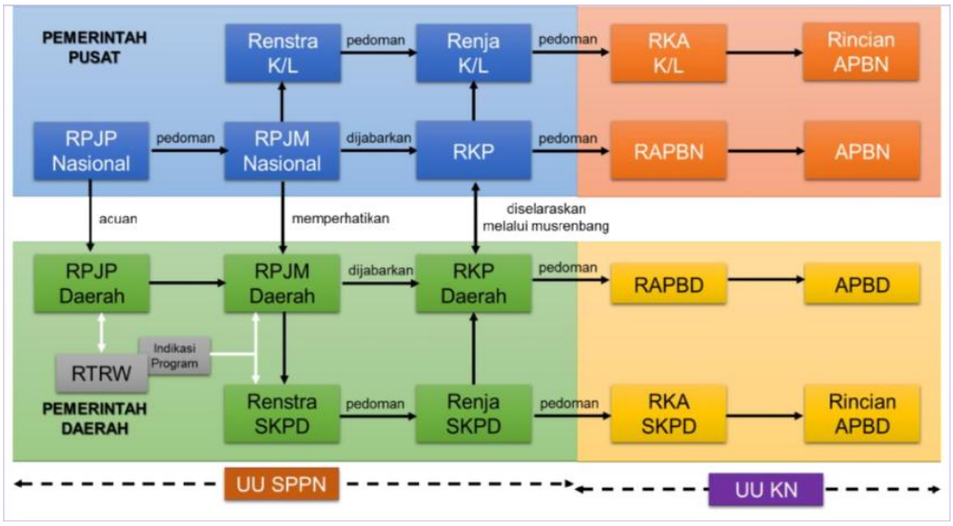
Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek merupakan penjabaran Visi, Misi, dan Program Prioritas *(platform)* serta Arah Kebijakan Bupati - Wakil Bupati yang bertumpu pada Visi Pembangunan Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2029 adalah **"Terwujudnya Kabupaten Trenggalek Yang Adil dan Makmur".** Dalam mewujudkan Visi tersebut ditetapkan Misi pembangunan Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Memantapkan Trenggalek sebagai Kota Atraktif dengan infrastruktur yang merata, handal dan ramah lingkungan;
2. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan regeneratif berbasis sumber daya unggulan daerah;
3. Memantapkan Trenggalek sebagai Kota Lestari yang Harmonis dan Berkelanjutan;
4. Mengoptimalkan pembangunan manusia yang sehat, kreatif dan berdaya saing;
5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Melayani.

Dalam hal kaitannya dengan sistem keuangan yang diamanatkan dalam UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka Renstra OPD akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja OPD untuk setiap tahunnya, dan harus dijadikan pedoman bagi penyusunan RKA OPD yang merupakan masukan untuk penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Trenggalek.

Diagram keterkaitan antara Renstra OPD dengan dokumen perencanaan di tingkat pusat, dokumen perencanaan yang menjadi pedoman dan turunan dari Renstra OPD, serta perencanaan keuangan daerah, sebagaimana Gambar 1.1

Gambar 1.1
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Penyusunan rencana strategis ini digunakan sebagai acuan dalam upaya mewujudkan sistem pelayanan yang terpadu, efektif, efisien dan berkesinambungan sehingga pembangunan urusan perindustrian, ketenagakerjaan dan transmigrasi di Kabupaten Trenggalek dapat lebih optimal sesuai dengan harapan yang diinginkan. Dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek diharapkan dapat disusun tahapan pencapaian hasil secara lebih obyektif untuk memberikan komitmen dan orientasi target serta sasaran di masa depan pada masing-masing program dan kegiatan, serta dapat menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan tahunan atau renja perangkat daerah dalam setiap tahun pada periode renstra ini.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
e. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian.
f. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.
g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
h. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

i. Undang-Undang Nomor 59 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025-2045.
j. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
k. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 – 2029.
l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
o. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
p. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2045.
q. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
r. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
s. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2029 adalah sebagai dokumen perencanaan pembangunan industri dan ketenagakerjaan di Kabupaten Trenggalek selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja merupakan satu dokumen rencana resmi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengarahkan pelayanan OPD dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun

ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Rencana strategis ini memberi arah pengembangan pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, arah yang hendak dicapai, bagaimana mencapainya dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai serta mengarahkan pengambilan keputusan dan tindakan di berbagai peringkat organisasi sesuai dengan sumber daya yang ada.

Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja merupakan panduan dalam menyusun prioritas pembangunan bidang perindustrian dan tenaga kerja yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja ini adalah :

1. Menterjemahkan visi, misi dan program pembangunan dalam RPJMD secara nyata ke dalam tujuan, sasaran, program dan kegiatan di Renstra sesuai dengan tugas dan fungsi;
2. Mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis hasil/kinerja;
3. Menciptakan mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah yang fokus, tidak tumpang tindih, dan terintegrasi;
4. Membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan, dan akuntabel;
5. Menciptakan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan yang efektif dan efisien.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah:

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Dasar Hukum Penyusunan
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan
2.1.5. Mitra Perangkat Daerah Dalam Memberikan Pelayanan
2.1.6. Dukungan BUMD Dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah
2.1.7. Kerjasama Daerah Yang Menjadi Tanggung jawab Perangkat Daerah
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

2.2.2. Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Uraian Program

4.2. Uraian Kegiatan

4.3. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif

4.4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

4.5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

4.6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dalam menjalankan Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek berdasarkan pada Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 22 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati dimaksud bahwa Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian, Bidang Tenaga Kerja dan Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi yang dipimpin oleh kepala Dinas dimana dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri atas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
c. Bidang Pelatihan, Produktivitas dan Hubungan Industrial;
d. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
e. Bidang Perindustrian;
f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
g. UPTD.

Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang perindustrian, bidang tenaga kerja dan Urusan Pemerintahan bidang transmigrasi.

Untuk melaksanakan tugasnya, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang tenaga kerja;
2. Penyusunan perencanaan program dan anggaran urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang tenaga kerja;
3. Pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang tenaga kerja;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang tenaga kerja;
5. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang tenaga kerja;

6. Pembinaan penyelenggaraan kegiatan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan tenaga kerja;
7. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
8. Pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang tenaga kerja;
9. Penyusunan perjanjian kerja;
10. Penetapan dan pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional prosedur;
11. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara periodik;
12. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
13. Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
14. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas jabatan struktural Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek sesuai dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 22 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat mempunyai tugas:
   a. merencanakan kebijakan operasional pada Sekretariat berdasarkan kebijakan umum Kepala Dinas dan rencana strategis Dinas sebagai pedoman kerja;
   b. mengoordinasikan perumusan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Pemerintahan daerah, perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Dinas;
   c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan tentang program penunjang Urusan Pemerintahan daerah, perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja, administrasi keuangan, administrasi umum, penyediaan urusan penunjang, pemeliharaan barang milik daerah, untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
   d. mengoordinasikan penyusunan bahan pemberitaan yang berkaitan dengan kebijakan Kepala Dinas dan kegiatan Dinas, mendokumentasikan berita dan penyelenggaraan hubungan masyarakat;
   e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian di Sekretariat mempunyai tugas:
   a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian sebagai acuan kerja;
   b. menyiapkan bahan koordinasi teknis dengan Unit Kerja lain terkait dengan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
   c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis tentang kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas
   d. mengelola dan mendistribusikan kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor;
   e. menyiapkan bahan pemberitaan yang berkaitan dengan kebijakan Kepala Dinas dan kegiatan Dinas serta mendokumentasikan berita;
   f. melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan rumah tangga, urusan surat menyurat dan ketatalaksanaan serta kepegawaian Dinas;
   g. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penataan kelembagaan, analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan, informasi faktor jabatan dan evaluasi jabatan lingkup Dinas;
   h. menyiapkan bahan pembinaan dibidang umum dan kepegawaian Dinas;
   i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas sub bagian umum dan kepegawaian; dan
   j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya
3. Bidang Pelatihan, Produktivitas dan Hubungan Industrial mempunyai tugas :
   a. menyusun program kerja bidang pelatihan, produktivitas dan hubungan industrial sebagai penjabaran rencana strategis Dinas;
   b. merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang pelatihan, produktivitas dan hubungan industrial;
   c. merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dibidang pelatihan, produktivitas dan hubungan industrial;
   d. melaksanakan program kerja dan kegiatan dibidang pelatihan, produktivitas dan hubungan industrial
   e. melaksanakan kegiatan pelatihan berdasarkan unit kompetensi;
   f. melaksanakan kegiatan pembinaaan lembaga pelatihan kerja swasta;
   g. melaksanakan perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja;

h. melaksanakan kegiatan konsultansi produktivitas pada perusahaan kecil;
i. melaksanakan kegiatan pengukuran produktivitas Daerah;
j. melaksanakan kegiatan pengesahan peraturan Perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam Daerah;
k. melaksanakan kegiatan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah;
l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang pelatihan, produktivitas dan hubungan industrial; dan,
m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi mempunyai tugas:
   a. menyusun program kerja bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi sebagai penjabaran rencana strategis Dinas;
   b. merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi;
   c. merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi;
   d. melaksanakan program kerja dan kegiatan dibidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi
   e. melaksanakan kegiatan pelayanan antar kerja di Daerah;
   f. melaksanakan kegaitan penerbitan izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta dalam Daerah;
   g. melaksanakan pengelolaan informasi pasar kerja dalam Daerah;
   h. melaksanakan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah;
   i. melaksanakan penerbitan perpanjangan izin menggunakan tenaga kerja asing yang lokasi kerja dalam Daerah;
   j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi; dan
   k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang perindustrian mempunyai tugas:
   a. menyusun program kerja Bidang perindustrian sebagai penjabaran rencana strategis Dinas;

b. merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang perindustrian;
c. merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang perindustrian;
d. melaksanakan program kerja dan kegiatan dibidang perindustrian;
e. melaksanakan kegiatan penetapan rencana pembangunan industri Daerah;
f. melaksanakan penerbitan izin usaha industri kecil dan izin usaha industri menengah;
g. melaksanakan penerbitan izin perluasan usaha industri bagi industri kecil dan menengah;
h. melaksanakan penerbitan izin usaha kawasan industri dan izin perluasan kawasan industri yang lokasinya di Daerah
i. melaksanakan penyampaian laporan informasi industri untuk izin usaha industri kecil dan izin perluasannya, izin usaha industri menengah dan izin perluasannya serta izin usaha kawasan industri dan izin perluasan Kawasan industri yang lokasinya di Daerah;
j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang perindustrian; dan
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional secara umum diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 1 tahun 2023, sedangkan secara khusus Jabatan Fungsional Instruktur diatur dalam Peraturan Menteri Kentenagakerjaan Nomor 12 tahun 2024.

1) Jabatan fungsional pada bidang pelatihan, produktivitas, dan hubungan industrial

Jabatan Fungsional pada bidang ini terdiri dari jabatan fungsional Instruktur dan jabatan fungsional Mediator Hubungan Industrial.

- Jabatan Fungsional Instruktur :

kondisi yang ada saat ini sebanyak 3 (tiga) orang dengan rincian Instruktur Ahli Pertama sebanyak 3 (tiga) orang. Sedangkan fungsional Mediator Hubungan Industrial sebanyak 2 (dua) orang dengan rincian Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda sebanyak 2 (satu) orang.

Sesuai Peraturan Menteri Kentenagakerjaan Nomor 12 tahun 2024 dijelaskan bahwa Jabatan Fungsional Instruktur adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengembangan pelatihan.

Jabatan Fungsional Instruktur memiliki peran dan fungsi sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pelatihan kerja pada Instansi Pemerintah. Jabatan Fungsional Instruktur pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek berada dibawah Kepala Bidang Pelatihan, Produktivitas dan Hubungan Industrial, namun apabila UPTD BLK Kabupaten Trenggalek sudah berdiri Jabatan Fungsional Instruktur akan berada dibawah Kepala UPTD BLK Kabupaten Trenggalek.

Jabatan Fungsional Instruktur mempunyai tugas melaksanakan pelatihan kerja dan pengembangan pelatihan kerja. Adapun ruang lingkup tugas Jabatan Fungsional Instruktur meliputi:

a. Penyusunan rencana pelatihan;
b. Pembuatan perangkat pelatihan;
c. Pengajaran dan pelatihan;
d. Pelayanan pelatihan dan produktivitas;
e. Pelaksanaan evaluasi;
f. Pengembangan program pelatihan; dan
g. Pengembangan sistem pelatihan.

Jabatan Fungsional Instruktur merupakan jabatan fungsional kategori keahlian. Jenjang Jabatan Fungsional Instruktur terdiri atas:

a. Instruktur Ahli Pertama
b. Instruktur Ahli Muda
c. Instruktur Ahli Madya
d. Instruktur Ahli Utama

- Jabatan fungsional Mediator Hubungan Industrial :

  Berdasarkan Permenpan & RB No. 17 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial Serta Tata Kerja Mediasi, Mediator mempunyai tugas:

  1. pembinaan hubungan industrial;
  2. pengembangan hubungan industrial; dan
  3. penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di luar pengadilan.

2) Jabatan fungsional pada bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi

Jabatan fungsional pada bidang ini terdiri dari jabatan fungsional Pengantar Kerja dan Penggerak Swadaya Masyarakat.

a. Jabatan Fungsional Pengantar :

Kerja kondisi yang ada saat ini sebanyak 3 (tiga) orang dengan rincian Pengantar Kerja Ahli Muda sebanyak 2 (dua) orang dan

Pengantar Kerja Ahli Pertama sebanyak 1 (satu) orang. Sedangkan fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat sebanyak 1 (satu) orang yaitu Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama.

Berdasarkan Permenpan RB no. 01 tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Pengantar Kerja mempunyai tugas:

a) Pengantar Kerja Ahli Pertama mempunyai tugas:

- Penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang antar kerja.
- Pemberian layanan informasi pasar kerja dan analisis pasar kerja
- Pelaksanaan bimbingan jabatan kepada pencari kerja
- Pelayanan penempatan tenaga kerja melalui sistem antar kerja.
- Pelayanan perluasan kesempatan kerja di sektor formal dan informal.
- Koordinasi antar instansi dan lembaga yang terkait dengan penempatan tenaga kerja.
- Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan antar kerja
  Pengembangan metode dan sistem pelayanan antar kerja berbasis digital.

b) Pengantar Kerja Ahli Muda mempunyai tugas :

- mengidentifikasi sumber daya Antar Kerja;
- melakukan layanan analisis jabatan lanjutan;
- menganalisis informasi pasar kerja;
- melakukan penyuluhan jabatan kepada tenaga kerja terkena pemutusan hubungan kerja/ disabilitas / lansia / orangtua siswa / kelompok masyarakat;
- menyusun struktur biaya penempatan Pekerja Migran Indonesia; mengevaluasi substansi perjanjian kerjasama/ kemitraan Antar Kerja;
- mensosialisasikan program/kegiatan Antar Kerja kepada pemberi kerja atau lembaga penempatan tenaga kerja atau P3MI;
- melakukan pelayanan pemberian informasi penempatan tenaga kerja kepada pemberi kerja;
- melakukan pelayanan pemenuhan penempatan kepada pemberi kerja;
- melakukan bimbingan jabatan kepada kepada tenaga kerja pernah bekerja atau ter-PHK atau disabilitas atau lansia atau alih profesi atau karyawan perusahaan;

- melakukan rekrutmen calon tenaga kerja untuk penempatan;
- melakukan seleksi administratif pencari kerja untuk penempatan;
- melakukan pembekalan kepada tenaga kerja untuk penempatan tenaga kerja;
- menganalisis dokumen perjanjian penempatan/ perjanjian kerja;
- menganalisis penyediaan dokumen pemberangkatan tenaga kerja;
- melakukan pendampingan pemberangkatan tenaga kerja;
- melakukan pemantauan penempatan tenaga kerja;
- mendampingi peserta kegiatan perluasan kesempatan kerja;
- melakukan penyelesaian masalah selama penempatan tenaga kerja dalam/luar negeri;
- melakukan pendampingan pemulangan tenaga kerja;
- melakukan penilaian kelayakan permohonan Pengesahan RPTKA untuk 1 sampai dengan 10 orang TKA;
- melakukan validasi dan analisis permohonan Pengesahan RPTKA/pencabutan Pengesahan RPTKA/perubahan Pengesahan RPTKA;
- menganalisis hasil pemantauan penggunaan TKA;
- menganalisis pelaksanaan alih teknologi dan alih keahlian kepada tenaga kerja pendamping;
- menganalisis kelayakan permohonan perizinan berusaha lembaga penempatan tenaga kerja melalui uji kesahihan (ekspose);
- memverifikasi berkas kelayakan permohonan perizinan berusaha atau pencabutan izin lembaga penempatan tenaga kerja atau P3MI;
- menyusun rekomendasi sertifikat standar atas permohonan perizinan berusaha lembaga penempatan tenaga kerja atau P3MI;
- menyusun konsep penolakan/permintaan kelengkapan perizinan berusaha atau pencabutan izin lembaga penempatan tenaga kerja atau P3MI;
- melakukan pemantauan operasional lembaga penempatan/bursa kerja raya;
- memantau Antar Kerja; dan
- mengevaluasi kerjasama/kemitraan Antar Kerja;
-

c) *Pengantar Kerja Ahli Madya mempunyai tugas*:
- menganalisis kebutuhan Antar Kerja;
- menyusun bahan teknis rencana pelaksanaan kegiatan Antar Kerja
- menyusun standar Antar Kerja;
- menyusun bahan teknis pembekalan Antar Kerja bagi pencari kerja;
- melakukan layanan analisis jabatan advance (mahir);
- menyusun media layanan Antar Kerja;
- melakukan penyuluhan jabatan kepada petugas Antar Kerja di lembaga penempatan/pelatihan;
- melakukan pendampingan kepada petugas Antar Kerja/pemandu/petugas teknis dalam perantaraan kerja/informasi pasar kerja;
- menyusun rencana rekrutmen penempatan tenaga kerja;
- menyusun rencana seleksi penempatan tenaga kerja;
- merumuskan standar/kriteria penilaian penghargaan;
- menyusun bahan modalitas kerjasama/ kemitraan untuk Antar Kerja;
- mensosialisasikan program/kegiatan pelayanan Antar Kerja pada kementerian atau lembaga;
- melakukan seleksi psikotes atau wawancara kepada pencari kerja untuk penempatan;
- melakukan pemberian informasi sebagai saksi dalam rangka penyelesaian permasalahan Antar Kerja;
- melakukan penilaian kelayakan permohonan Pengesahan RPTKA untuk 1 (satu) sampai dengan 49 (empat puluh Sembilan) orang TKA secara daring;
- melakukan evaluasi permohonan Pengesahan RPTKA/pencabutan Pengesahan RPTKA/ perubahan Pengesahan RPTKA;
- menganalisis hasil survei kepuasan masyarakat terhadap penggunaan TKA/penilaian zona integritas/penilaian ISO zona pelayanan;
- mengevaluasi Antar Kerja;
- menyusun profil penempatan tenaga kerja; dan
- merumuskan masukan teknis untuk pengkajian/penyusunan kebijakan, peraturan perundang-undangan Antar Kerja.

d) Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama

Berdasarkan PermenPANRB No. 3 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional mempunyai tugas:

- Tugas Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat yaitu melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berdasarkan ruang lingkup kegiatan meliputi pengembangan komitmen perubahan masyarakat, pengembangan kapasitas masyarakat, dan pemantapan kemandirian masyarakat dalam pengembangan ekonomi, sosial budaya dan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kelembagaan, serta pengelolaan lingkungan kemasyarakatan.
  Ruang lingkup kegiatan sebagaimana pada setiap jenjang jabatan fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat meliputi: Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama melaksanakan identifikasi, pengumpulan data dan informasi pemberdayaan masyarakat, serta melaksanakan kegiatan operasional dan pengembangan komitmen perubahan masyarakat;

3) Jabatan Fungsional Pada Bidang Perindustrian

a. Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan. Dasar Hukum :

- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 129/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan dan Angka Kreditnya
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 614/MPP/Kep/10/20204 tentang Pedoman Pembinaan dan Teknis Penghitungan Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Perindag.
- Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.

Tugas dan Pokok Fungsi Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan :

a) Perencanaan dan Persiapan Penyuluhan

- Identifikasi Masalah: Menganalisis dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha di sektor industri dan perdagangan.
- Pengumpulan Data: Mengumpulkan data dan informasi potensi wilayah, produk, serta pelaku usaha untuk menyusun program penyuluhan yang relevan.

- Penyusunan Program Kerja: Merancang program dan rencana kerja tahunan atau berkala untuk kegiatan penyuluhan, bimbingan, dan konsultasi.
- Pengembangan Materi: Menyusun materi penyuluhan yang informatif dan mudah dipahami, baik untuk sektor industri maupun perdagangan.

b) Pelaksanaan Penyuluhan dan Bimbingan Teknis

- Penyuluhan Langsung: Melakukan kunjungan tatap muka atau anjangsana kepada pelaku usaha dan kelompok usaha (misalnya IKM) untuk memberikan bimbingan dan arahan.
- Pemberian Konsultasi: Memberikan layanan konsultasi kepada pengusaha terkait aspek manajemen, produksi, pemasaran, dan legalitas usaha.
- Fasilitasi: Memfasilitasi pelaku usaha dalam berbagai hal, seperti akses terhadap teknologi, perizinan, sertifikasi mutu, hingga akses pasar.
- Bimbingan Teknis: Mengorganisir dan melaksanakan kegiatan bimbingan teknis untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan pelaku usaha.

c) Evaluasi dan Pelaporan

- Evaluasi Hasil: Melakukan evaluasi terhadap dampak dari kegiatan penyuluhan yang telah dilakukan.
- Penyusunan Laporan: Membuat laporan hasil kerja secara berkala yang berisi pencapaian, kendala, dan rekomendasi untuk perbaikan program di masa mendatang.

Secara umum, semua tugas tersebut bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan menumbuhkan sektor industri terutama bagi usaha mikro, kecil, dan menengah, agar dapat berkontribusi lebih besar pada perekonomian daerah dan nasional.

b. Jabatan Fungsional Pembina Industri

Dasar Hukum Jabatan Fungsional Pembina Industri Adalah :

- Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN): Ini adalah payung hukum yang mengatur secara umum seluruh jabatan fungsional di Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil: Aturan ini memberikan rincian lebih lanjut mengenai pengelolaan ASN, termasuk jabatan fungsional.

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2020: Peraturan ini secara khusus mengatur tentang Jabatan Fungsional Pembina Industri.
- Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 18 Tahun 2020, Jabatan Fungsional (JF) Pembina Industri memiliki tugas pokok dan fungsi utama untuk melaksanakan pembinaan dan pengembangan sektor industri.

  Tugas dan fungsi tersebut secara garis besar mencakup:

  a) Perencanaan dan Pembinaan Teknis
     - Penyusunan Rencana: Menyusun rencana kerja dan program pembinaan untuk sektor industri, termasuk Industri Kecil dan Menengah (IKM).
     - Identifikasi Potensi: Mengidentifikasi potensi dan permasalahan yang ada di dalam suatu industri atau kelompok industri.
     - Penyusunan Pedoman: Merumuskan dan mengembangkan pedoman teknis, standar operasional, serta kebijakan terkait pembinaan industri.

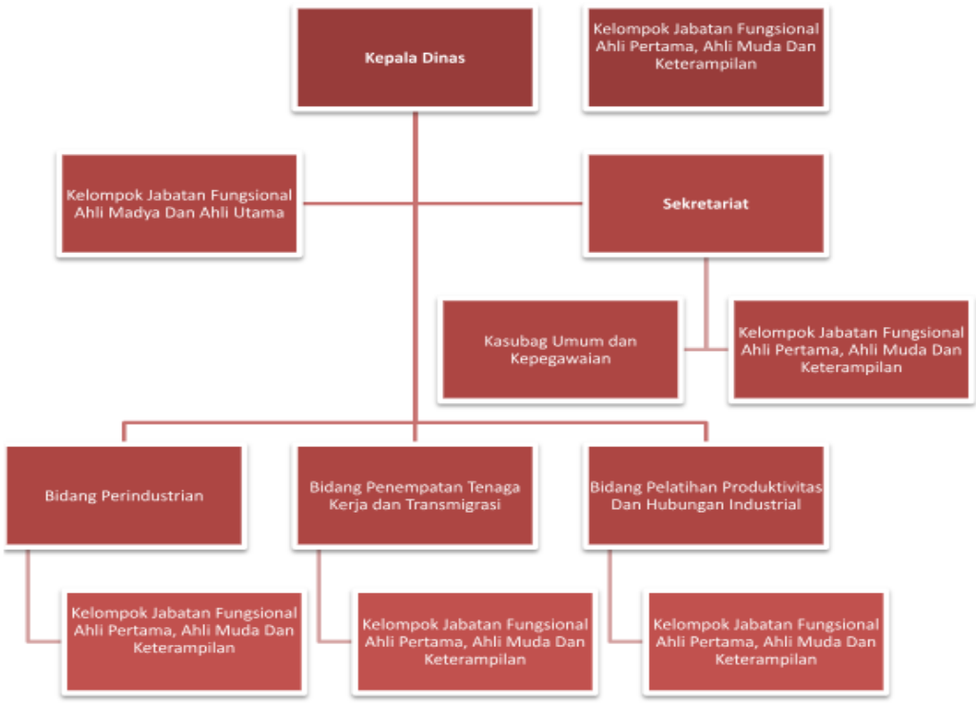
  b) Pelaksanaan Pembinaan dan Fasilitasi
     - Bimbingan dan Konsultasi: Memberikan bimbingan teknis, bimbingan manajerial, dan konsultasi kepada pelaku industri, terutama dalam hal peningkatan efisiensi produksi, mutu produk, dan pengembangan pasar.
     - Fasilitasi: Memfasilitasi pelaku industri untuk memperoleh akses permodalan, teknologi, bahan baku, dan pasar.
     - Pendampingan: Melakukan pendampingan dalam penerapan standar industri (seperti SNI) dan sertifikasi produk.
     - Promosi: Melaksanakan kegiatan promosi dan pameran untuk membantu pemasaran produk-produk industri lokal.

  c) Evaluasi dan Pelaporan
     - Monitoring dan Evaluasi: Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan dan program pembinaan industri yang telah berjalan.
     - Penyusunan Laporan: Menyusun laporan berkala mengenai hasil pembinaan, capaian, dan kendala yang dihadapi untuk dijadikan bahan rekomendasi kebijakan.

Secara umum, semua tugas ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan, meningkatkan daya saing, dan mewujudkan kemandirian sektor industri di

Indonesia agar dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Dinas Perindutrian dan Tenaga Kerja
Kabupaten Trenggalek



2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi di dukung oleh sumberdaya manusia aparatur sebanyak 47 orang, secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1.2.1
Keadaan Pegawai Berdasarkan Status Pegawai

No	Status Pegawai	L	P	Jumlah	Keterangan
1	PNS	17	11	28	
2	CPNS	2	2	4	
3	PPPK	11	4	15	
4	Tenaga Non ASN	0	0	0	
	Jumlah	**30**	**17**	**47**	

Sumber Data : Disperinaker Tahun 2025

Tabel 2.1.2.2
Rekapitulasi Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)

No	Golongan/Pendidikan/Eselon/Diklat	Jumlah	Satuan
	Menurut Golongan (PNS) :		
1	Golongan IV	6	Orang
2	Golongan III	21	Orang
3	Golongan II	5	Orang
4	Golongan I	0	Orang
	Jumlah	**32**	Orang
	Menurut Golongan (PPPK) :		
1	Golongan IX	5	Orang
2	Golongan V	4	Orang
3	Golongan I	6	Orang
	Jumlah	**15**	**Orang**
	Menurut Pendidikan :		
1	S2	6	Orang
2	S1	24	Orang
3	Diploma	1	Orang
4	SMA / Sederajat	8	Orang
5	SMP / Sederajat	2	Orang
6	SD / Sederajat	6	Orang
	Jumlah	47	Orang
	Menurut Jenis Kediklatan :		
1	Struktural	5	Orang
2	Fungsional	16	Orang
3	Pelaksana	26	Orang
	Jumlah	47	Orang
	Menurut Jenis Kelamin :		
1	Laki-Laki	30	Orang
2	Perempuan	17	Orang
	Jumlah	**47**	Orang

Sumber daya manusia (SDM) merujuk pada individu-individu yang bekerja dan berkontribusi dengan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan mereka untuk mencapai tujuan suatu organisasi atau perusahaan. SDM juga dapat berarti

departemen atau fungsi yang bertanggung jawab untuk mengelola tenaga kerja, mulai dari perekrutan, pengembangan, hingga kesejahteraan karyawan. SDM merupakan aset terpenting karena menjadi penggerak utama organisasi dan dapat mengendalikan faktor-faktor sumber daya lain seperti teknologi, modal, dan bahan baku**.**

1. Rencana Pembentukan UPTD BLK Kabupaten Trenggalek

Dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kerja yang handal sesuai kebutuhan pasar kerja tentunya diperlukan sebuah lembaga pelatihan kerja yang kredibel dan fokus dibidangnya. Kehadiran sebuah lembaga pelatihan kerja di Kabupaten Trenggalek sangat dibutuhkan, sebagai instrumen dalam mengembangkan Sumber Daya Manusia yang diharapkan menjadi "*agent of change*" dalam mentransfer pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Kabupaten yang berfungsi sebagai pelaksana teknis operasional di bidang pelatihan tenaga kerja untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, khususnya bagi masyarakat yang hanya memiliki tingkat pendidikan setara dengan SD, SMP dan SMA, yang biasanya memiliki keterampilan rendah dan tidak mampu melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Melalui programprogram dan kurikulum pelatihan yang ada di BLK, diharapkan dapat mentransfer pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang produktif sehingga nantinya mampu melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas, kompeten dan memenuhi permintaan pasar tenaga kerja.

Dengan adanya UPTD BLK di Kabupaten Trenggalek akan meningkatkan akses dalam penyediaan untuk mendapatkan program, sarana dan prasarana dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan lembaga lainnya.

Terkait dengan implementasi kelembagaan UPTD BLK di Kabupaten Trenggalek, diperlukan penambahan Sumber Daya yang meliputi Pegawai, Pembiayaan, Sarana dan Prasarana.

a) Pegawai yang akan ditempatkan pada UPTD diperlukan karena SDM atau personil Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek saat ini sangat terbatas.
b) Penambahan pegawai baik ASN ataupun PPPK yang akan ditempatkan di UPTD. BLK Kabupaten Trenggalek antara lain :
   1) Kepala UPTD /Eselon IV (1 Orang)
   2) Jabatan Pelaksana (3 Orang) yang terdiri dari:
      - Penelaah Teknis Kebijakan (1 orang);
      - Pengolah Data dan Informasi (1 orang);
      - Pengadministrasi Perkantoran (1 orang).
   3) Jabatan Fungsional (Instruktur) (6 orang)

- Instruktur Ahli Madya (1 orang)
- Instruktur Ahli Muda (1 Orang)
- Instruktur Ahli Pertama (4 Orang)

c) Belanja Pegawai dan biaya operasional kantor. Biaya operasional kantor UPTD BLK perlu direncanakan Kembali, sementara anggaran yang direncanakan untuk kegiatan pelatihan, berada pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi yang dilaksanakan di bidang Pelatihan Produktivitas dan Hubungan Industrial Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek.

d) Sarana dan prasarana kerja berupa kantor dan perlengkapannya.telah tersedia. Kebutuhan sarana dan prasarana menjadi modal penting sebuah lembaga pelatihan kerja Pemerintah seperti Balai Latihan Kerja. Gedung dan peralatan praktek di Balai Latihan Kerja merupakan hasil dari pemerintah daerah yang dibangun pada tahun 2015 - 2016 menempati area seluas 5.444 m2 , beralamat Jalan Patimura Nomor 31 Trenggalek, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek. Keberadaan gedung UPTD BLK Kabupaten Trenggalek sudah cukup representatif yang terdiri dari :

1) Gedung Utama /Kantor;
2) Gedung Praktek (Workshop/Bengkel);
   - Workshop Kejuruan Las (Teknik Las Listrik);
   - Workshop Kejuruan Teknik Otomotif (Teknik Sepeda Motor);
   - Workshop Kejuruan Prossesing (Tata Boga);
   - Workshop Kejuruan Menjahit (Garment);
   - Worksop Kejuruan Tata Rias (tata Rias Manten).
3) Ruang Kelas/Ruang Teori;
4) Aula/Ruang Pertemuan;
5) Ruang Ibadah;
6) Ruang Pelayanan;
7) Asrama;
8) Laboratorium Kriya;
9) Ruang Laktasi;
10) Pos Keamanan;
11) Sarana Olahraga;
12) Kamar Mandi;
13) Tempat Parkir.

Gambar. 2.1.2.1

Lokasi Rencana UPTD BLK Kabupaten Trenggalek



2. Unit Layanan Edukasi Rumah Susu

Selain didukung sumberdaya manusia, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek juga didukung dengan unit usaha yang masih berjalan yakni : Usaha Trenggalek Milk House atau Rumah Susu Trenggalek yang berada di Jalan Brigjen Soetran, Kelurahan Sumbergedong, Kabupaten Trenggalek.

Rumah Susu Trenggalek merupakan inisiatif strategis untuk mengelola potensi susu lokal dari Kabupaten Trenggalek guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendukung perekonomian IKM penghasil dan pengolah susu. Tujuan didirikannya Trenggalek Milk House ini adalah untuk :

a. memberikan standarisasi kualitas yakni memastikan semua produk susu memenuhi standar BPOM melalui pengawasan ketat terhadap proses pengolahan, karena susu rentan terhadap pertumbuhan bakteri jika tidak dikelola dengan baik
b. Peningkatan Nilai Tambah yakni dengan mengolah susu segar menjadi produk bernilai tinggi untuk meningkatkan pendapatan peternak dan IKM,
c. Meningkatkan daya saing produk susu lokal melalui branding komunal.
d. Pemberdayaan ekonomi dengan memberikan manfaat ekonomi bagi peternak sapi perah dan kambing etawa serta pelaku IKM pengolahan susu.

Selain itu keberadaan Rumah Susu di Kecamatan Trenggalek ini menjadi destinasi wisata terbaru, yaitu wisata edukasi sekaligus menjadi wisata kuliner di Kabupaten Trenggalek. Wisata edukasi Rumah Susu Trenggalek mengusung tema dengan keunggulan susu yang dihasilkan dari wilayah Kabupaten Trenggalek. Wisata edukasi yang disediakan di Rumah Susu berupa pembelajaran mengenai pengolahan, jenis olahan hingga kandungan susu. Dengan adanya Trenggalek Milk House, diharapkan terjadi

peningkatan kualitas produk, kesejahteraan peternak, dan pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Gambar 2.1.2.2
Rumah Susu Trenggalek





Rumah Susu Trenggalek masih melayani pembelian produk susu dari IKM olahan susu dengan sistem titip jual. Sehingga barang atau produk olahan susu akan dibayarkan apabila susu telah terjual pada saat kiriman berikutnya. Jam Operasional Rumah Susu Trenggalek yakni hari Senin hingga hari Jumat Pukul 08.00 – 15.30 WIB dan hari Sabtu dan Minggu Pukul 08.00 – 13.00 WIB. Pada saat ini produk olahan susu yang ada di Rumah Susu Trenggalek mencapai lebih dari 10 Industri Kecil Mengah (IKM) yang terdiri dari susu pasteurisasi, yoghurt, ice cream, permen susu, dan jajanan asal susu lainnya.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan perangkat daerah adalah pengukuran keberhasilan perangkat daerah dalam memberikan pelayanan publik sesuai standar yang ditetapkan, penilaian kinerja ini bertujuan untuk memastikan pelayanan yang optimal, transparan, dan efisien untuk mencapai kepuasan dan kesejahteraan masyarakat, serta membangun citra positif pemerintah daerah.

Tabel 2.1.3.1 Analisis Capaian Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target						Realisasi						Capaian					
		2021	2022	2023	2024	2025	Akhir Periode Renstra 2025	2021	2022	2023	2024	2025	Akhir Periode Renstra 2025	2021	2022	2023	2024	2025	Akhir Periode Renstra 2025
Meningkatnya kualitas, produktivitas, dan kesejahteraan tenaga kerja, penempatan dan perluasan kesempatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	76.7	76,95	77,2	77,45	80,24	80,24	72.36	72,01	80,72	80,08			94.34	93,58	104,56	103,39		
	Persentase tenaga kerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan	3.02	3,27	3,51	3,75	4,00	4.24	3.14	3,63	4,62	7,85			103.97	111,01	131,62 %	209,33		
	Persentase perselisihan HI yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			100	100	100	100		
Meningkatnya kualitas pelayanan penempatan transmigran	Persentase transmigran yang tidak meninggalk	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			100	100	100	100		

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target						Realisasi						Capaian					
		2021	2022	2023	2024	2025	Akhir Periode Renstra 2025	2021	2022	2023	2024	2025	Akhir Periode Renstra 2025	2021	2022	2023	2024	2025	Akhir Periode Renstra 2025
	an daerah penempatan																		
Meningkatnya kualitas dan produktivitas Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Persentase pertumbuhan Industri Kecil Dan Menengah (IKM)	0.96	2,3	3,84	6,76	8,49	5,96	7.49	2,7	44,91	5,71			780.21	117,39	1.169	85,61		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (kategori nilai) SAKIP	81.5	82	82,50	88,64	89,11	89,16	82.76	85,64	87,54	N/A			101.55	104,44	106,11	N/A		
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76	76,5	77,00	99,72	99,76	99,86	83.35	88,92	99.71	99,76			109.67	116,23	129,49	100,04		

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan adalah sekelompok orang, perusahaan, atau organisasi yang merupakan target utama penerima manfaat langsung dari suatu layanan atau program. Mereka dicirikan oleh kebutuhan, keinginan, atau pola perilaku yang serupa, dan identifikasi mereka menjadi dasar penting dalam perencanaan dan pengembangan program pelayanan. Kelompok ini juga bisa mencakup kelompok rentan yang membutuhkan perhatian khusus dan penyesuaian dalam akses layanan publik, seperti penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, dan anak-anak.

Adapun kelompok sasaran layanan di Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek dapat sangat beragam, mencakup pelaku industri (dari IKM hingga industri besar), pencari kerja, pekerja/buruh, serta pelaku usaha terkait. Layanan diberikan untuk memfasilitasi pengembangan industri, peningkatan keterampilan tenaga kerja, penempatan kerja, dan pembinaan usaha.

Berikut adalah rincian kelompok sasaran Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek berdasarkan tugas dan fungsi pada masing-masing bidang yang ada di Perindustrian Dan Tenaga Kerja yaitu:

1. Bidang Pelatihan, Produktivitas dan Hubungan Industrial
   Sasaran layanan / penerima manfaat meliputi :
   a. Para Pencari Kerja, yaitu penyelenggaraan Pelatihan berbasis kompetensi (tehnik pengelasan, menjahit, tata boga, barbershop, barista, olahan jajanan khas, tata rias pengantin, multimedia, operator computer, digital marketing)
   b. Penerima manfaat Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan meliputi petani tembakau, marbot Masjid, bakul ethek, pekerja disabilitas, masyarakat miskin, nelayan, tukang ojek, persampahan, peternak
   c. Perusahan dan buruh Perusahaan yang mengalami perselisihan

2. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
   Sasaran layanan / penerima manfaat meliputi :
   a. Para pencari kerja dalam hal pengurusan Kartu AK 1
   b. Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dalam pengurusan ID CPMI,
   c. Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan yaitu pemberian pelatihan ketrampilan
   d. Siswa/Siswi SMA/SMK melalui Bursa Kerja Khusus (BKK), berupa penyuluhan dan bimbingan jabatan memasuki dunia kerja
   e. Wira Usaha Baru yang telah memiliki rintisan usaha yaitu pelatihan pengembangan kewirausahaan

3. Bidang Perindustrian,

   Sasaran layanan / penerima manfaat adalah Industri Kecil Menengah (IKM) dalam hal fasilitasi izin usaha industri, pelatihan ketrampilan bagi IKM, fasilitasi sertifikasi halal, fasilitasi sertifikasi merk dan fasilitasi uji nutrisi

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Memberikan Pelayanan

Dalam rangka memberikan pelayanan urusan perindustrian dan urusan tenaga kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek bekerja dengan beberapa mitra Perangkat Daerah dan instansi di luar Pemerintah Daerah sebagai berikut.

a. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP)

Dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan iklim usaha yang kondusif, hubungan antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu / DPMPTSP dan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja memiliki peran yang sangat strategis dan saling melengkapi. Kedua instansi ini bekerja sama dalam proses pengembangan sektor industri termasuk Sumber Daya Manusia di dalamnya, terutama dalam aspek perizinan, pengawasan, dan pembinaan terhadap pelaku industri. Hubungan keduanya terjalin dalam bentuk koordinasi dan sinkronisasi, khususnya dalam proses:

- Penerbitan Izin Usaha

  Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja memberikan rekomendasi teknis, sedangkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu / DPMPTSP memproses dan menerbitkan izin tersebut.
- Konsultasi dan Pembinaan

  Dalam proses pembinaan terhadap pelaku usaha, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dapat menyampaikan masukan atau permintaan evaluasi izin kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu / DPMPTSP jika ditemukan pelanggaran atau ketidaksesuaian di lapangan.
- Sistem Informasi Terpadu

  Kedua dinas menggunakan sistem informasi perizinan terintegrasi untuk mempercepat pelayanan dan mempermudah pemantauan proses izin.
- Pengawasan Bersama

  Dalam beberapa kasus,Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu / DPMPTSP dan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dapat melakukan inspeksi atau monitoring bersama terhadap industri yang telah memperoleh izin, guna memastikan kepatuhan terhadap peraturan.

b. *BPJS Ketenagakerjaan, APINDO, Perangkat Daerah Pengampu Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)*

Dalam upaya meningkatkan perlindungan tenaga kerja, mendorong peningkatan kompetensi, dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja menjalin kerja sama strategis dengan BPJS Ketenagakerjaan, APINDO, dan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS). Hubungan ini terjalin dalam bentuk koordinasi dan sinkronisasi yang konkret melalui beberapa aspek utama berikut:

- Perluasan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

  Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja bersama BPJS Ketenagakerjaan melakukan sosialisasi, pendataan, serta mendorong perluasan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja, baik formal maupun informal. Selain itu, dilakukan pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan dalam mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan, guna memastikan hak perlindungan dasar pekerja terpenuhi.
- Pembinaan Hubungan Industrial dan Mediasi Ketenagakerjaan

  Melalui koordinasi dengan APINDO sebagai wadah pengusaha, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja melaksanakan pembinaan hubungan industrial secara berkelanjutan. Kegiatan ini mencakup penyusunan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), fasilitasi dialog antara pengusaha dan pekerja, serta penyelesaian perselisihan hubungan kerja guna menciptakan iklim ketenagakerjaan yang harmonis dan produktif.
- Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja

  Melalui LPKS Untuk mendukung peningkatan daya saing tenaga kerja daerah, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja bermitra dengan LPKS dalam pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi. Program ini meliputi pelatihan sesuai kebutuhan industri, uji sertifikasi keahlian, serta penyaluran tenaga kerja ke dunia usaha dan industri, sebagai bentuk dukungan terhadap penyerapan tenaga kerja dan pengurangan pengangguran.

c. Mitra kegiatan dengan BP2MI, P3MI, LPK dan PT BPR Jwalita

Dalam upaya pelindungan tenaga kerja khususnya Pekerja Migran Indonesia (PMI), Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja menjalin kerja sama strategis dengan BP2MI, P3MI dan PT BPR Jwalita. Hubungan ini terjalin dalam bentuk kerjasama yang meliputi:

- Penempatan Pekerja Migran Indonesia
  Dalam rangka pelindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja mengadakan kerja sama baik dengan BP2MI dan P3MI. Hal ini bertujuan agar penempatan Pekerja Migran Indonesia asal Kabupaten Trenggalek sesuai dengan regulasi yang ada.
- Pembiayaan Bagi Pekerja Migran Indonesia
  Dalam rangka membantu pembiayaan bagi Pekerja Migran Indonesia, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja menjalin kerja sama dengan PT BPR Jwalita, yaitu berupa pemberian kredit kepada Pekerja Migran Indonesia yang mengalami kesulitan pendanaan untuk bekerja di luar negeri.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Sebagai upaya dalam mendorong Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek menjadi lembaga yang mampu menjalankan peran dan tupoksinya ditengah dinamika pembangunan dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan Kabupaten Trenggalek yang tertuang dalam misi 2*: Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, produktif, dan regeneratif berbasis sumber daya lokal unggulan" dan misi 4 : "Mengoptimalkan transformasi sosial melalui pembangunan manusia yang sehat, berbudaya, kreatif, dan terlindungi".* Dalam mendukung dan mewujudkan visi dan misi pembangunan Kebupaten Trenggalek tersebut maka Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek selalu memiliki dinamika permasalahan dan isu yang selalu mengiringi antara lain :

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2.2.1.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Permasalahan
Tingkat pengangguran terbuka masih tinggi	Masih rendahnya kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja	Belum maksimalnya pelaksanaan pelatihan kerja
		Lowongan kerja tidak sebanding dengan pencari kerja
	Kurang optimalnya penempatan tenaga kerja	Kompetensi tenaga kerja belum sesuai dengan kebutuhan pasar kerja
		Masih kurangnya informasi lowongan kerja
		Kurangnya pemberdayaan PMI purna
	Rendahnya kesempatan kerja	Kurangnya pengembangan pelatihan wirausaha baru
Belum optimalnya pengawasan ketenagakerjaan	Masih rendahnya tingkat perlindungan tenaga kerja	Masih banyaknya pekerja yang belum ikut serta dalam program Jamsostek (BPJS Ketenagakerjaan)

Masalah Pokok	Masalah	Permasalahan
		Masih rendahnya perusahaan yang mempunyai Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
Tingginya animo masyarakat bertransmigrasi belum diimbangi dengan kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat	Kurangnya alokasi penempatan bagi peserta program transmigrasi	Masih kurangnya kuota penempatan transmigrasi dibanding calon transmigran
		Kurangnya informasi potensi lokasi transmigrasi yang akan dituju.
		Lokasi tujuan transmigrasi yang ditentukan berbeda dengan lokasi yang diminati oleh pendaftar transmigrasi
Rendahnya kualitas sumber daya manusia, terhadap praktik produksi yang efisien dan ramah lingkungan, sehingga menghambat pertumbuhan usaha secara berkelanjutan	Masih rendahnya kesadaran IKM untuk melakukan input data ke aplikasi SIINAS (Sistem Informasi Industri Nasional)	Pada tahun 2024, diketahui berdasarkan data OSS RBA yang terintegrasi dengan SIINAS 6.006 Industri Kecil Menengah (IKM) di Kabupaten Trenggalek, dengan kata lain terjadi pertumbuhan IKM sebanyak 2.714 pelaku usaha jika dibandingkan dengan tahun 2023. Disisi lain, IKM yang telah mengimplementasikan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) masih berjumlah sebanyak 133 pelaku usaha.
	Pemanfaatan teknologi digital yang masih rendah di masa Transisi Menuju Industri 4.0	IKM dengan skala usaha mikro/ kecil kurang beradaptasi dengan kebutuhan pasar serta rendahnya tingkat kompetensi di dalam pemasaran yang berakibat pada market share yang rendah di market place. Revolusi industri 4.0 dengan penggunaan digitalisasi memunculkan peluang bagi industri yaitu berpotensi memberi peningkatan ketenagakerjaan hingga 2.1 juta pekerjaan sampai dengan tahun 2025. Industri Pengolahan di dominasi skala usaha mikro yang berbentuk home industry
	Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM) belum disertai dengan pengembangan kemampuan pengelolaan lingkungan dapat memberikan dampak negatif di masa yang akan datang	IKM belum memiliki pemahaman yang memadai tentang pentingnya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. IKM memiliki keterbatasan akses informasi tentang praktik ramah lingkungan dan teknologi yang hemat energi.IKM dapat mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, seperti air, hutan, dan mineral, tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan.Penggunaan kemasan plastik yang berlebihan oleh IKM dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan sulit terurai.Penerapan industri hijau pada industri kecil dan menengah (IKM) ditargetkan hanya 50

Masalah Pokok	Masalah	Permasalahan
		persen pada tahun 2030 karena tantangan teknologi dan proses produksi yang umumnya belum mutakhir.IKM dapat mengurangi limbah dengan cara menerapkan 3R (Reduce, Reuse, Recycle), menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan, dan mengolah limbah dengan benar. Selain itu, penerapan praktik ramah lingkungan lainnya: IKM dapat menerapkan praktik ramah lingkungan lainnya seperti pengelolaan limbah B3 yang benar, pengurangan penggunaan plastik, dan penanaman pohon.
Kurangnya standarisasi dan pengelolaan yang aman terhadap produk olahan susu di Kabupaten Trenggalek, yang berpotensi membahayakan kesehatan konsumen serta menghambat distribusi dan daya saing produk lokal.	Pengolahan susu memerlukan penanganan khusus karena rentan terhadap pertumbuhan bakteri jika tidak dikelola secara higienis dan sesuai standar.	Belum adanya fasilitas terpadu untuk edukasi, produksi, dan distribusi produk susu yang aman dan berkualitas.
	Potensi besar dari sektor peternakan sapi perah dan kambing etawa belum dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan ekonomi lokal.	Kurangnya pemanfaatan potensi wisata edukatif berbasis susu sebagai daya tarik daerah

2.2.2 Isu Strategis

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja secara langsung mendukung Visi Pembangunan Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2029 **“Terwujudnya Kabupaten Trenggalek Yang Adil dan Makmur**". Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan regeneratif berbasis sumber daya unggulan daerah dan Mengoptimalkan pembangunan manusia yang sehat, kreatif dan berdaya saing. Selain itu, juga Memantapkan Trenggalek sebagai Kota Atraktif dengan infrastruktur yang merata, handal dan ramah lingkungan melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif dan dukungan infrastruktur ketenagakerjaan. Berikut adalah isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja:

b. Peningkatan Daya Saing Industri Lokal:

Keberhasilan industri akan sangat mempengaruhi keadaan perekonomian di suatu daerah. Isu strategis peningkatan daya saing produk industri lokal meliputi peningkatan kualitas produk, inovasi, pemasaran yang efektif, dan dukungan pemerintah. Peningkatan kualitas produk dapat dicapai melalui penerapan standar mutu,

penggunaan bahan baku berkualitas, dan peningkatan keterampilan tenaga kerja. Inovasi produk dan pemasaran yang kreatif, termasuk pemanfaatan platform digital, juga penting untuk menarik minat konsumen. Selain itu, pengembangan industri juga mencakup upaya untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan daya saing industri melalui penerapan prinsip-prinsip ramah lingkungan. Ini melibatkan efisiensi penggunaan sumber daya, pengurangan dampak lingkungan, dan penerapan teknologi hijau dalam proses produksi dengan dukungan pemerintah dalam bentuk regulasi yang kondusif, akses permodalan, dan pembinaan pelaku usaha

b. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja:
   Kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki tenaga kerja dengan kebutuhan industri, kurangnya program pelatihan yang relevan, serta rendahnya tingkat sertifikasi kompetensi tenaga kerja menjadikan isu strategis permasalahan ketenagakerjaan di Kabupaten Trenggalek. Hal ini juga termasuk potensi bonus demografi yang belum teroptimalkan dan perlindungan tenaga kerja migran yang belum optimal.
   Kualitas SDM yang mumpuni adalah fondasi untuk menciptakan tenaga kerja yang sehat, kreatif, dan berdaya saing tinggi. Produktivitas tenaga kerja yang tinggi akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang regeneratif.
c. Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Unggulan Daerah:
   Belum optimalnya hilirisasi produk dari sektor unggulan daerah (misalnya pertanian, perikanan, pariwisata) menjadi produk industri yang memiliki nilai tambah tinggi menyebabkan produk unggulan daerah belum mampu meningkatkan perekonomian Masyarakat Kabupaten Trenggalek pada umumnya.
   Pengembangan ekonomi berbasis sumber daya unggulan daerah memerlukan transformasi dari bahan mentah menjadi produk bernilai jual tinggi melalui proses industri.
d. Perluasan Kesempatan Kerja dan Penurunan Angka Pengangguran:
   Tingginya angka pengangguran terbuka, khususnya di kalangan usia produktif dan lulusan baru, serta kurangnya lapangan kerja yang sesuai dengan kualifikasi adalah permasalahan utama yang harus dicarikan solusinya.
   Peningkatan kesempatan kerja adalah indikator utama keberhasilan pembangunan ekonomi yang inklusif. Ketersediaan lapangan kerja yang memadai akan mengoptimalkan potensi sumber daya manusia.

e. Pengembangan Ekosistem Industri yang Kondusif:

   Dirasa masih kurang adanya sinergi antara pelaku usaha, akademisi, pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan iklim investasi dan pengembangan industri yang menarik.

   Ekosistem industri yang kuat akan menjadikan Trenggalek lebih atraktif bagi investor. Tata kelola pemerintahan yang baik akan mendukung penciptaan ekosistem ini.

Dengan mengatasi isu-isu strategis ini akan memungkinkan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja berkontribusi secara signifikan terhadap pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Trenggalek 2025-2029, khususnya dalam menciptakan ekonomi yang kuat dan sumber daya manusia yang berkualitas.

Isu-isu strategis ini menjadi dasar bagi Disperinaker Trenggalek dalam merumuskan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode Renstra. Penanganan isu-isu ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Trenggalek

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Untuk merealisasikan pelaksanaan Visi, Misi RPJMD Kabupaten Trenggalek, maka Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja perlu menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan ini ditetapkan untuk mengikuti arah terhadap program pembangunan kabupaten secara umum. Disamping itu juga dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran misi serta program yang telah ditetapkan.

Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun atau jangka menengah yang merupakan penjabaran dari misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Daerah.

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kabupaten Trenggalek pada periode Renstra 2025-2029 menetapkan tujuan dalam mendukung tercapainya visi, misi dan program prioritas pemerintah daerah Kabupaten Trenggalek adalah

" ***Terwujudnya Produktivitas Tenaga Kerja dan Meningkatnya daya saing industri*** " dengan Indikator tujuan yaitu : ***(1) Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja dan (2) Rasio PDRB Industri Pengolahan.***

Tingkat produktivitas tenaga kerja merupakan Rasio output hasil kerja terhadap keseluruhan tenaga kerja pada sektor formal maupun informal. Rasio PDRB Industri Pengolahan adalah nilai total produksi barang dan jasa yang dihasilkan di suatu wilayah selama periode tertentu dari Industri pengolahan yang melakukan proses transformasi bahan mentah atau bahan baku menjadi produk akhir.

TABEL 3.1.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan
Periode Tahun 2025-2029
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	KETERANGAN
Terwujudnya Produktivitas Tenaga Kerja dan Meningkatnya daya saing industri	Tingkat produktivitas tenaga kerja	Meningkatnya Perluasan Kesempatan Kerja,	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	Peningkatan kualitas Tenaga Kerja dengan pelatihan berbasis kompetensi	Peningkatan Pelaksanaan Pelatihan Berbasis Kompetensi beserta Uji Sertifikasi kompetensi	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) merupakan Perbandingan antara jumlah penduduk yang bekerja dengan jumlah angkatan kerja
					Peningkatan kualitas Lembaga Pelatihan kerja dengan sertifikasi akreditasi	Tingkat produktivitas tenaga kerja merupakan Rasio output hasil kerja terhadap keseluruhan tenaga kerja pada sektor formal maupun informal
					Peningkatan sarana dan prasarana BLK	
					Peningkatan kompetensi tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja	
				Peningkatan penempatan tenaga kerja	Pengembangan Job Center dan memperkuat sistem teknologi informasi penempatan serta menjalin kemitraan dengan pengguna	
				Optimalisasi informasi pasar kerja	Peningkatan informasi lowongan kerja	

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	KETERANGAN
				Peningkatan pemberdayaan PMI purna	Peningkatan pembinaan, pelatihan dan pemberdayaan PMI purna	
				Peningkatan kesempatan kerja	Pengembangan pelatihan wirausaha baru	
				Peningkatan peserta program BPJS	Peningkatan kepesertaan program BPJS ketenagakerjaan bagi perusahaan dan tenaga kerja	
				Peningkatan penyelesaian Hubungan Industrial	Mendorong penyelesaian hubungan industrial yang kondusif dan mendorong pembentukan LKS Bipartit, Peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama	
				Penambahan kuota program transmigrasi	Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi	
				Peningkatan kompetensi calon transmigran	Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi	
	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Meningkatnya Jumlah Industri pada Level Kabupaten/Kota	Persentase pertumbuhan IKM	peningkatan standarisasi produk industri Kecil dan Menengah (IKM)	peningkatan fasilitasi merk, desain kemasan, uji nutrisi, sertifikasi halal	Rasio PDRB Industri Pengolahan adalah nilai total produksi barang dan jasa yang dihasilkan di suatu wilayah selama periode tertentu dari Industri pengolahan yang melakukan proses transformasi bahan mentah atau bahan baku menjadi produk akhir.
				pengembangan pembinaan dan pelatihan Industri	peningkatan pembinaan dan pelatihan Industri Kecil dan Menengah (IKM) serta	Persentase pertumbuhan IKM dalam hal ini adalah peningkatan standarisasi produk industri Kecil dan Menengah (IKM)

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	KETERANGAN
				Kecil dan Menengah (IKM)	pengembangan produk Industri Kecil dan Menengah (IKM)	
				peningkatan pengendalian dan pengawasan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	mendorong pengendalian dan pengawasan pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	
		Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Untuk Mendukung Tercapaianya Visi Pemerintahan	Nilai rata-rata survey kepuasan masyarakat			
			Nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah			

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil *(outcome)* program Perangkat Daerah. Sasaran Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek dalam kurun waktu 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

1. Sasaran 1, Meningkatnya Perluasan Kesempatan Kerja, dengan indikator sasaran yaitu, Tingkat Kesempatan Kerja (TKK).
2. Sasaran 2, Meningkatnya Jumlah Industri pada Level Kabupaten/Kota dengan indikator sasaran yaitu, Persentase pertumbuhan IKM.
3. Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Untuk Mendukung Tercapaianya Visi Pemerintahan dengan indikator 1. Nilai rata-rata survey kepuasan masyarakat, 2. Nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) merupakan Perbandingan antara jumlah penduduk yang bekerja dengan jumlah angkatan kerja. Persentase pertumbuhan IKM dalam hal ini adalah IKM yang memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) adalah Industri Kecil dan Menengah yang telah terdaftar melalui aplikasi OSS RBA pada tahun berkenaan, dengan asumsi NIB IKM yang diterbitkan per tahun sebanyak 1.000 NIB.

3.3 Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program- program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi kumpulan beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Strategi Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek dalam mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 yaitu :

a. Peningkatan kualitas Tenaga Kerja dengan pelatihan berbasis kompetensi
b. Peningkatan penempatan tenaga kerja
c. Optimalisasi informasi pasar kerja
d. Peningkatan pemberdayaan PMI purna
e. Peningkatan kesempatan kerja
f. Peningkatan peserta program BPJS
g. Peningkatan penyelesaian Hubungan Industrial

h. Penambahan kuota program transmigrasi
i. Peningkatan kompetensi calon transmigran
j. Peningkatan standarisasi dan sertifikasi produk industri Kecil dan Menengah (IKM)
k. Pengembangan pembinaan dan pelatihan Industri Kecil dan Menengah (IKM)
l. Peningkatan pengendalian dan pengawasan Industri Kecil dan Menengah (IKM)

Tabel 3.3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
3.31.3.32.2.07.11.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA											
- Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Terwujudnya Produktivitas Tenaga Kerja dan Meningkatnya Daya Saing Industri		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Rupiah/Kapita)	32.066.846,38	32.176.221	32.193.628	32.210.046	32.225.556	32.240.232	32.254.138	
			Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	19,42	19,43	19,45	19,46	19,47	19,49	19,50	
		Meningkatnya Perluasan Kesempatan Kerja	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) (%)	96,10	96,13	96,15	96,17	96,19	96,21	96,23	
		Meningkatnya Jumlah Industri pada Level Kabupaten/Kota	Persentase pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM) (%)	35,45	8,49	7,83	7,26	6,77	6,34	5,96	
		Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Untuk Mendukung Tercapainya Visi Pemerintahan	Nilai rata-rata survey kepuasan masyarakatÂ (SKM) (Indeks)	99,76	99,76	99,78	99,80	99,82	99,84	99,86	
			Nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah (Nilai)	87,54	89,11	89,12	89,13	89,14	89,15	89,16	

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Kebijakan adalah merupakan tahapan perencanaan dalam menentukan arah maupun tindakan yang diambil oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/kegiatan guna tercapainya keberhasilan, kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan

Arah kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan sebagai berikut :

a. Peningkatan Pelaksanaan Pelatihan Berbasis Kompetensi beserta Uji Sertifikasi kompetensi
b. Peningkatan kualitas Lembaga Pelatihan Kerja dengan sertifikasi akreditasi
c. Peningkatan sarana dan prasarana BLK
d. Peningkatan kompetensi tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja
e. Peningkatan informasi lowongan kerja
f. Pengembangan Job Center dan memperkuat sistem teknologi informasi penempatan serta menjalin kemitraan dengan pengguna
g. Peningkatan pembinaan, pelatihan dan pemberdayaan PMI purna
h. Pengembangan pelatihan wirausaha baru
i. Peningkatan kepesertaan program BPJS ketenagakerjaan bagi perusahaan dan tenaga kerja
j. Mendorong penyelesaian hubungan industrial yang kondusif dan mendorong pembentukan LKS Bipartit, Peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama
k. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi
l. Peningkatan fasilitasi merk, desain kemasan, uji nutrisi, sertifikasi halal
m. Peningkatan pembinaan dan pelatihan Industri Kecil dan Menengah (IKM) serta pengembangan produk Industri Kecil dan Menengah (IKM)
n. Mendorong pengendalian dan pengawasan pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Dalam periode Renstra Tahun 2025-2029 maka Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek menjalankan 9 (sembilan) Program yaitu :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,
b. Program Perencanaan Tenaga Kerja
c. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
d. Program Penempatan Tenaga Kerja
e. Program Hubungan Industrial
f. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
g. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
h. Program Pengendalian Izin Usaha Industri
i. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Tabel 4.1.1 Program Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					8.760.862.190		8.421.932.100		8.421.286.700		8.419.632.500		8.442.262.500	
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.419.206.190		5.113.703.300		5.112.557.900		5.111.403.700		5.134.033.700	
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi (%)	100	100	100	5.419.206.190	100	5.113.703.300	100	5.112.557.900	100	5.111.403.700	100	5.134.033.700	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
	Persentase nilai aset dalam kondisi baik (%)	98	98	98		98		98		98		98		Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					0		0		500.000		0		0	
Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase Rencana Tenaga Kerja yang dapat disusun (%)	0	0	0	0	0	0	100	500.000	0	0	0	0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					941.656.000		853.680.700		853.680.700		853.680.700		853.680.700	
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi pada tahun n (%)	0,00026	0,05	0,069	941.656.000	0,091	853.680.700	0,112	853.680.700	0,134	853.680.700	0,155	853.680.700	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					175.000.000		158.378.100		158.378.100		158.378.100		158.378.100	
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (Persentase)	44,81	44,9	45	175.000.000	45,1	158.378.100	45,15	158.378.100	45,2	158.378.100	45,25	158.378.100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					2.225.000.000		2.296.170.000		2.296.170.000		2.296.170.000		2.296.170.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial ()	850	1.000	1.000	2.225.000.000	1.000	2.296.170.000	1.000	2.296.170.000	1.000	2.296.170.000	1.000	2.296.170.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					515.000.000		675.581.300		675.581.300		675.581.300		675.581.300	
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					390.000.000		576.426.300		576.426.300		576.426.300		576.426.300	
Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase)	16,76	16,76	16,76	390.000.000	16,9	576.426.300	16,9	576.426.300	17,1	576.426.300	17,1	576.426.300	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					75.000.000		41.500.000		41.500.000		41.500.000		41.500.000	
Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (Persentase)	5,71	0,6	0,5	75.000.000	0,5	41.500.000	0,5	41.500.000	0,5	41.500.000	0,5	41.500.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					50.000.000		57.655.000		57.655.000		57.655.000		57.655.000	
Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini (Persentase)	12,25	20	40	50.000.000	60	57.655.000	80	57.655.000	100	57.655.000	20	57.655.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					115.000.000		59.517.500		59.017.500		59.517.500		59.517.500	
3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					115.000.000		59.517.500		59.017.500		59.517.500		59.517.500	
Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi	Persentase transmigran yang tidak meninggalkan daerah penempatan (%)	100	100	100	115.000.000	100	59.517.500	100	59.017.500	100	59.517.500	100	59.517.500	Dinas/Badan yang menangani Bidang Transmigrasi
TOTAL KESELURUHAN					9.390.862.190		9.157.030.900		9.155.885.500		9.154.731.300		9.177.361.300	

4.2 Uraian Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran *(output)* dalam bentuk barang/jasa.

Dalam periode Renstra Tahun 2025-2029 maka Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek melaksanakan 18 (delapan belas) kegiatan yaitu :

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
g. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
h. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
i. Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
j. Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten / Kota
k. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
l. Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
m. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
n. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
o. Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
p. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
q. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota
r. Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota.

4.3 Uraian Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, Dan Pagu Indikatif

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan memiliki hubungan hierarki dan saling terkait dalam mencapai tujuan organisasi. Sub Kegiatan adalah bagian dari kegiatan yang terdiri dari satu atau beberapa jenis belanja untuk mencapai keluaran yang telah ditetapkan dalam kegiatan tersebut. Jadi, sub kegiatan adalah rincian lebih lanjut dari sebuah kegiatan.

Dalam periode Renstra Tahun 2025-2029 maka Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek melaksanakan 51 (lima puluh satu) Sub Kegiatan yaitu :

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
c. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
d. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
e. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
f. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
g. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
h. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
i. Penyediaan Bahan/Material
j. Fasilitasi Kunjungan Tamu
k. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
l. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
m. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
n. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya
o. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
p. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
q. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
r. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
s. Pemeliharaan Mebel
t. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
u. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
v. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
w. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
x. Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro
y. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi

z. Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
aa. Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota
bb. Pelayanan antar Kerja
cc. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
dd. Perluasan Kesempatan Kerja
ee. Penyelenggaraan Unit Layanan
ff. Disabilitas Ketenagakerjaan
gg. Job Fair/Bursa Kerja
hh. Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
ii. Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan
jj. Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
kk. Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
ll. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
mm. Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
nn. Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
oo. Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
pp. Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
qq. Penyuluhan Transmigrasi
rr. Penyuluhan dan Sosialisasi Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal Dan OPD Tingkat Kabupaten/ Kota
ss. Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi
tt. Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
uu. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
vv. Pelaksanaan Pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di Level Kabupaten/Kota
ww. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota
xx. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional

(SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

yy. Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

Tabel 4.3.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
3.31.3.32.2.07.11.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA							
- Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Terwujudnya Produktivitas Tenaga Kerja dan Meningkatnya Daya Saing Industri				Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Rupiah/Kapita)		
					Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)		
		Meningkatnya Perluasan Kesempatan Kerja			Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) (%)		
			Terkelolanya informasi tenaga kerja		Persentase Rencana Tenaga Kerja yang dapat disusun (%)	2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	
				Tersesusunnya Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	2.07.02.2.01 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	
					Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro (Orang)	2.07.02.2.01 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	
					Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	2.07.02.2.01.0001 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	
					Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro (Orang)	2.07.02.2.01.0003 - Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	
			Meningkatnya produktivitas tenaga kerja		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi pada tahun n (%)	2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Terlaksananya Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n (Lembaga)	2.07.03.2.01 - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	
					Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja (Unit)	2.07.03.2.01 - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	
					Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	2.07.03.2.01 - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	
					Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	2.07.03.2.01.0001 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	
					Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n (Lembaga)	2.07.03.2.01.0002 - Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	
					Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja (Unit)	2.07.03.2.01.0003 - Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya penempatan tenaga kerja		Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (Persentase)	2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
				Terlaksananya Pelayanan Antar Kerja di Daerah	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan (Orang)	2.07.04.2.01 - Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD (Orang)	2.07.04.2.01 - Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang)	2.07.04.2.01 - Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL (Orang)	2.07.04.2.01 - Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL (Orang)	2.07.04.2.01.0002 - Pelayanan antar Kerja	
					Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan (Orang)	2.07.04.2.01.0003 - Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	
					Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD (Orang)	2.07.04.2.01.0004 - Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	
					Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang)	2.07.04.2.01.0005 - Perluasan Kesempatan Kerja	
				Terlaksananya Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)	2.07.04.2.03 - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	
					Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)	2.07.04.2.03.0003 - Job Fair/Bursa Kerja	
				Terlaksananya Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya (Orang)	2.07.04.2.04 - Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan (Orang)	2.07.04.2.04 - Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya (Orang)	2.07.04.2.04.0001 - Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	
					Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan (Orang)	2.07.04.2.04.0003 - Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	
			Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi		Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial ()	2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
				Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan)	2.07.05.2.01 - Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)	2.07.05.2.01 - Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)	2.07.05.2.01.0001 - Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	
					Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan)	2.07.05.2.01.0003 - Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Terlaksananya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga)	2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan (Perkara)	2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	
					Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang)	2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan (Perkara)	2.07.05.2.02.0002 - Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga)	2.07.05.2.02.0004 - Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	
					Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang)	2.07.05.2.02.0005 - Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	
			Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi		Persentase transmigran yang tidak meninggalkan daerah penempatan (%)	3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Terlaksananya Fasilitasi Penataan Persebaran Penduduk	Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal yang Mendapatkan Penyuluhan (Orang)	3.32.03.2.01 - Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan (Kepala Keluarga)	3.32.03.2.01 - Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	3.32.03.2.01 - Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Lokasi)	3.32.03.2.01 - Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan (Kepala Keluarga)	3.32.03.2.01 - Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	3.32.03.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan (Kepala Keluarga)	3.32.03.2.01.0004 - Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan (Kepala Keluarga)	3.32.03.2.01.0005 - Penyuluhan Transmigrasi	
					Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal yang Mendapatkan Penyuluhan (Orang)	3.32.03.2.01.0010 - Penyuluhan Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Lokasi)	3.32.03.2.01.0020 - Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	
		Meningkatnya Jumlah Industri pada Level Kabupaten/Kota			Persentase pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM) (%)		
			Meningkatnya realisasi pembangunan industri		Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase)	3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
				Terlaksananya Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
					- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan (Dokumen)	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	3.31.02.2.01.0001 - Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	3.31.02.2.01.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan (Dokumen)	3.31.02.2.01.0008 - Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian		Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (Persentase)	3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	
				Terlaksananya Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	3.31.03.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	3.31.03.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	
					-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	3.31.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	3.31.03.2.01.0004 - Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	
			Meningkatnya pemanfaatan informasi industri		Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini (Persentase)	3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	
				Tersedianya Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)	3.31.04.2.01 - Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui	3.31.04.2.01.0001 - Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)		
		Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Untuk Mendukung Tercapainya Visi Pemerintahan			Nilai rata-rata survey kepuasan masyarakatÂ (SKM) (Indeks)		
					Nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah (Nilai)		
			Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah		Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi (%)	2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Persentase nilai aset dalam kondisi baik (%)	2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.07.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.07.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.07.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.07.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2.07.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.07.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.07.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2.07.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.07.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2.07.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.07.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.07.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	2.07.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.07.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.07.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.07.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.07.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.07.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.07.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.07.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	2.07.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2.07.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.07.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.07.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.07.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.07.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.07.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.07.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.07.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.07.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.07.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.07.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.07.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.07.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.07.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.07.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	2.07.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.07.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.07.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.07.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	2.07.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.07.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.07.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.07.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Tabel 4.3.2 Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan Dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				8.760.862.190		8.421.932.100		8.421.286.700		8.419.632.500		8.442.262.500		
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.419.206.190		5.113.703.300		5.112.557.900		5.111.403.700		5.134.033.700		
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	100	5.419.206.190	100	5.113.703.300	100	5.112.557.900	100	5.111.403.700	100	5.134.033.700	3.31.3.32.2.07.11.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase nilai aset dalam kondisi baik (%)	98	98		98		98		98		98			
2.07.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan				3.500.000		5.900.680		5.900.680		5.900.680		5.900.680		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	29	29	3.500.000	29	5.900.680	29	5.900.680	29	5.900.680	29	5.900.680		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	18	15		15		15		15		15			
2.07.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.000.000		3.341.590		3.341.590		3.341.590		3.341.590		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	18	15	2.000.000	15	3.341.590	15	3.341.590	15	3.341.590	15	3.341.590		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.07.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1.500.000		2.559.090		2.559.090		2.559.090		2.559.090		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	29	29	1.500.000	29	2.559.090	29	2.559.090	29	2.559.090	29	2.559.090		
2.07.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.957.134.409		4.625.296.992		4.625.296.992		4.625.296.992		4.625.296.992		
Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	30	47	4.957.134.409	47	4.625.296.992	47	4.625.296.992	47	4.625.296.992	47	4.625.296.992		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan	30	30		30		30		30		30			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Tugas ASN (Dokumen)													
2.07.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.902.134.409		4.573.519.992		4.573.519.992		4.573.519.992		4.573.519.992		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	30	47	4.902.134.409	47	4.573.519.992	47	4.573.519.992	47	4.573.519.992	47	4.573.519.992		
2.07.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				55.000.000		51.777.000		51.777.000		51.777.000		51.777.000		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	30	30	55.000.000	30	51.777.000	30	51.777.000	30	51.777.000	30	51.777.000		
2.07.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				146.000.000		131.384.332		131.384.332		131.384.332		131.384.332		
Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	3	146.000.000	3	131.384.332	3	131.384.332	3	131.384.332	3	131.384.332		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan	1	0		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)													
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2	5		5		5		5		5			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	46	40		40		40		40		40			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5	10		10		10		10		10			
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	6	10		10		10		10		10			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7	6		6		6		6		6			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	5	3		3		3		3		3			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Disediakan (Paket)													
2.07.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalas listrik / Penerangan Bangunan Kantor				3.000.000		4.041.450		4.041.450		4.041.450		4.041.450		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	3	3.000.000	3	4.041.450	3	4.041.450	3	4.041.450	3	4.041.450		
2.07.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10.000.000		14.091.100		14.091.100		14.091.100		14.091.100		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	3	10.000.000	3	14.091.100	3	14.091.100	3	14.091.100	3	14.091.100		
2.07.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				15.000.000		16.788.960		16.788.960		16.788.960		16.788.960		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5	10	15.000.000	10	16.788.960	10	16.788.960	10	16.788.960	10	16.788.960		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.07.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				30.000.000		23.890.242		23.890.242		23.890.242		23.890.242		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7	6	30.000.000	6	23.890.242	6	23.890.242	6	23.890.242	6	23.890.242		
2.07.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				30.000.000		25.316.580		25.316.580		25.316.580		25.316.580		
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	6	10	30.000.000	10	25.316.580	10	25.316.580	10	25.316.580	10	25.316.580		
2.07.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				8.000.000		7.974.400		7.974.400		7.974.400		7.974.400		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2	5	8.000.000	5	7.974.400	5	7.974.400	5	7.974.400	5	7.974.400		
2.07.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50.000.000		38.781.600		38.781.600		38.781.600		38.781.600		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	46	40	50.000.000	40	38.781.600	40	38.781.600	40	38.781.600	40	38.781.600		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Konsultasi SKPD (Laporan)													
2.07.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0		500		500		500		500		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	0	0	1	500	1	500	1	500	1	500		
2.07.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				25.000.000		72.938.992		72.938.992		72.938.992		72.938.992		
Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	25.000.000	30	72.938.992	30	72.938.992	30	72.938.992	30	72.938.992		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	3		3		3		3		3			
2.07.01.2.07.0006 - Pengadaan				25.000.000		40.880.120		40.880.120		40.880.120		40.880.120		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Peralatan dan Mesin Lainnya														
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	3	25.000.000	3	40.880.120	3	40.880.120	3	40.880.120	3	40.880.120		
2.07.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		32.058.872		32.058.872		32.058.872		32.058.872		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	30	32.058.872	30	32.058.872	30	32.058.872	30	32.058.872		
2.07.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				170.244.225		162.804.302		161.658.902		160.504.702		183.134.702		
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	13	0	170.244.225	12	162.804.302	12	161.658.902	12	160.504.702	12	183.134.702		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	5	3		3		3		3		3			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)													
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
2.07.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				130.244.225		120.188.525		119.043.125		117.888.925		129.744.225		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	130.244.225	12	120.188.525	12	119.043.125	12	117.888.925	12	129.744.225		
2.07.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				40.000.000		42.000.000		42.000.000		42.000.000		42.000.000		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	5	3	40.000.000	3	42.000.000	3	42.000.000	3	42.000.000	3	42.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Disediakan (Laporan)													
2.07.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0		615,777		615,777		615,777		11.390.477		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	13	0	0	12	615,777	12	615,777	12	615,777	12	11.390.477		
2.07.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				117.327.556		115.378.002		115.378.002		115.378.002		115.378.002		
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	50	30	117.327.556	30	115.378.002	30	115.378.002	30	115.378.002	30	115.378.002		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	21	21		21		21		21		21			
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	14	0		5		5		5		5			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
2.07.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				70.000.000		71.306.930		71.306.930		71.306.930		71.306.930		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	21	21	70.000.000	21	71.306.930	21	71.306.930	21	71.306.930	21	71.306.930		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)													
2.07.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				0		500		500		500		500		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	14	0	0	5	500	5	500	5	500	5	500		
2.07.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				31.427.556		22.671.072		22.671.072		22.671.072		22.671.072		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	50	30	31.427.556	30	22.671.072	30	22.671.072	30	22.671.072	30	22.671.072		
2.07.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				15.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	1	15.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000		
2.07.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung				900		900		900		900		900		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Kantor atau Bangunan Lainnya														
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	900	1	900	1	900	1	900	1	900		
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA				0		0		500		0		0		
Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase Rencana Tenaga Kerja yang dapat disusun (%)	0	0	0	0	0	100	500	0	0	0	0	3.31.3.32.2.07.11.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
2.07.02.2.01 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)				0		0		500		0		0		
Tersesusunnya Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro (Orang)	0	0	0	0	0	1	500	0	0	0	0		
	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga	0	0		0		1		0		0			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Kerja Makro (Dokumen)													
2.07.02.2.01.0001 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro				0		0		340		0		0		
Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	0	0	0	0	0	1	340	0	0	0	0		
2.07.02.2.01.0003 - Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro				0		0		160		0		0		
Terlaksananya fasilitasi penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro (Orang)	0	0	0	0	0	1	160	0	0	0	0		
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				941.656.000		853.680.700		853.680.700		853.680.700		853.680.700		
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi pada tahun n (%)	26	69	941.656.000	91	853.680.700	112	853.680.700	134	853.680.700	155	853.680.700	3.31.3.32.2.07.11.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.07.03.2.01 - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi				941.656.000		853.680.700		853.680.700		853.680.700		853.680.700		
Terlaksananya Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	120	100	941.656.000	100	853.680.700	100	853.680.700	100	853.680.700	100	853.680.700		
	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja (Unit)	20	0		1		1		1		1			
	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n (Lembaga)	41	41		41		41		41		41			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.07.03.2.01.0001 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				921.656.000		790.760.000		790.760.000		790.760.000		790.760.000		
Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	120	100	921.656.000	100	790.760.000	100	790.760.000	100	790.760.000	100	790.760.000		
2.07.03.2.01.0002 - Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja				20.000.000		24.253.600		24.253.600		24.253.600		24.253.600		
Terlaksananya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana	41	41	20.000.000	41	24.253.600	41	24.253.600	41	24.253.600	41	24.253.600		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n (Lembaga)													
2.07.03.2.01.0003 - Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota				0		38.667.100		38.667.100		38.667.100		38.667.100		
Tersedianya Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja (Unit)	20	0	0	1	38.667.100	1	38.667.100	1	38.667.100	1	38.667.100		
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				175.000.000		158.378.100		158.378.100		158.378.100		158.378.100		
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (Persentase)	44,81	45	175.000.000	45,1	158.378.100	45,15	158.378.100	45,2	158.378.100	45,25	158.378.100	3.31.3.32.2.07.11.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
2.07.04.2.01 - Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota				125.000.000		112.746.100		112.746.100		112.746.100		112.746.100		
Terlaksananya Pelayanan Antar Kerja di Daerah	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang	0	0	125.000.000	0	112.746.100	0	112.746.100	0	112.746.100	1	112.746.100		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD (Orang)													
	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL (Orang)	138	40		40		40		40		40			
	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang)	30	20		20		20		20		20			
	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan (Orang)	2,188	0		2,2		2,2		2,2		2,2			
2.07.04.2.01.0002 - Pelayanan antar Kerja				75.000.000		71.160.100		71.160.100		71.160.100		71.160.100		
Terwujudnya Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL (Orang)	138	40	75.000.000	40	71.160.100	40	71.160.100	40	71.160.100	40	71.160.100		
2.07.04.2.01.0003 - Penyuluhan dan				0		290		290		290		290		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja														
Terlaksananya Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan (Orang)	2,188	0	0	2,2	290	2,2	290	2,2	290	2,2	290		
2.07.04.2.01.0004 - Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan				0		0		0		0		296		
Terselenggaranya Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD (Orang)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	296		
2.07.04.2.01.0005 - Perluasan Kesempatan Kerja				50.000.000		41.296.000		41.296.000		41.296.000		41.000.000		
Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang)	30	20	50.000.000	20	41.296.000	20	41.296.000	20	41.296.000	20	41.000.000		
2.07.04.2.03 - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja				0		300		300		300		300		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)	102	0	0	40	300	50	300	50	300	50	300		
2.07.04.2.03.0003 - Job Fair/Bursa Kerja				0		300		300		300		300		
Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)	102	0	0	40	300	50	300	50	300	50	300		
2.07.04.2.04 - Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota				50.000.000		45.332.000		45.332.000		45.332.000		45.332.000		
Terlaksananya Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya (Orang)	0	0	50.000.000	0	45.332.000	0	45.332.000	0	45.332.000	6	45.332.000		
	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan (Orang)	20	20		20		20		20		20			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.07.04.2.04.0001 - Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)				0		0		0		0		5.332.000		
Terlaksananya Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya (Orang)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	5.332.000		
2.07.04.2.04.0003 - Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan				50.000.000		45.332.000		45.332.000		45.332.000		40.000.000		
Terlaksananya Pemberdayaan PMI Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan (Orang)	20	20	50.000.000	20	45.332.000	20	45.332.000	20	45.332.000	20	40.000.000		
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				2.225.000.000		2.296.170.000		2.296.170.000		2.296.170.000		2.296.170.000		
Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Jumlah Pekerja pada Perusahaan	850	10.000	2.225.000.000	10.000	2.296.170.000	10.000	2.296.170.000	10.000	2.296.170.000	10.000	2.296.170.000	3.31.3.32.2.07.11.0000 - DINAS	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial												PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
2.07.05.2.01 - Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				60.000.000		138.840.000		138.840.000		138.840.000		138.840.000		
Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)	5	5	60.000.000	5	138.840.000	5	138.840.000	5	138.840.000	5	138.840.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
2.07.05.2.01.0001 - Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan				10.000.000		17.400.000		17.400.000		17.400.000		17.400.000		
Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)	5	5	10.000.000	5	17.400.000	5	17.400.000	5	17.400.000	5	17.400.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.07.05.2.01.0003 - Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan				50.000.000		121.440.000		121.440.000		121.440.000		121.440.000		
Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan)	4	4	50.000.000	4	121.440.000	4	121.440.000	4	121.440.000	4	121.440.000		
2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota				2.165.000.000		2.157.330.000		2.157.330.000		2.157.330.000		2.157.330.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan (Perkara)	0	1	2.165.000.000	1	2.157.330.000	1	2.157.330.000	1	2.157.330.000	1	2.157.330.000		
	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga)	1	1		1		1		1		1			
	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang)	6,79	10		10		10		10		10			
2.07.05.2.02.0002 - Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				60.000.000		37.080.000		37.080.000		37.080.000		37.080.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan (Perkara)	0	1	60.000.000	1	37.080.000	1	37.080.000	1	37.080.000	1	37.080.000		
2.07.05.2.02.0004 - Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota				30.000.000		27.650.000		27.650.000		27.650.000		27.650.000		
Terlaksananya Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga)	1	1	30.000.000	1	27.650.000	1	27.650.000	1	27.650.000	1	27.650.000		
2.07.05.2.02.0005 - Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				2.075.000.000		2.092.600.000		2.092.600.000		2.092.600.000		2.092.600.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang)	6,79	10	2.075.000.000	10	2.092.600.000	10	2.092.600.000	10	2.092.600.000	10	2.092.600.000		
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				515.000.000		675.581.300		675.581.300		675.581.300		675.581.300		
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				390.000.000		576.426.300		576.426.300		576.426.300		576.426.300		
Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase)	16,76	16,76	390.000.000	16,9	576.426.300	16,9	576.426.300	17,1	576.426.300	17,1	576.426.300	3.31.3.32.2.07.11.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				390.000.000		576.426.300		576.426.300		576.426.300		576.426.300		
Terlaksananya Penyusunan dan Evaluasi Rencana	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,	1	1	390.000.000	1	576.426.300	1	576.426.300	1	576.426.300	1	576.426.300		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Pembangunan Industri	Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)													
	- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
3.31.02.2.01.0001 - Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				15.000.000		200.000.000		50.000.000		10.000.000		10.000.000		
Tersusunnya Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan	0	1	15.000.000	1	200.000.000	1	50.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Industri (Dokumen)													
3.31.02.2.01.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				300.000.000		226.426.300		376.426.300		416.426.300		416.426.300		
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	1	1	300.000.000	1	226.426.300	1	376.426.300	1	416.426.300	1	416.426.300		
3.31.02.2.01.0008 - Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota				75.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Terlaksananya pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat	1	1	75.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	diimplementasikan (Dokumen)													
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI				75.000.000		41.500.000		41.500.000		41.500.000		41.500.000		
Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (Persentase)	5,71	0,5	75.000.000	0,5	41.500.000	0,5	41.500.000	0,5	41.500.000	0,5	41.500.000	3.31.3.32.2.07.11.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
3.31.03.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota				75.000.000		41.500.000		41.500.000		41.500.000		41.500.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	1	0	75.000.000	1	41.500.000	1	41.500.000	1	41.500.000	1	41.500.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang	4	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)													
3.31.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota				0		10.000.000		10.000.000		15.000.000		15.000.000		
Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang	1	0	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)													
3.31.03.2.01.0004 - Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)				75.000.000		31.500.000		31.500.000		26.500.000		26.500.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terfasilitasinya verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang	4	1	75.000.000	1	31.500.000	1	31.500.000	1	26.500.000	1	26.500.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)													
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				50.000.000		57.655.000		57.655.000		57.655.000		57.655.000		
Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini (Persentase)	12,25	40	50.000.000	60	57.655.000	80	57.655.000	100	57.655.000	20	57.655.000	3.31.3.32.2.07.11.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
3.31.04.2.01 - Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI				50.000.000		57.655.000		57.655.000		57.655.000		57.655.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Kewenangan Kabupaten/Kota														
Tersedianya Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)	4	1	50.000.000	1	57.655.000	1	57.655.000	1	57.655.000	1	57.655.000		
3.31.04.2.01.0001 - Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				50.000.000		57.655.000		57.655.000		57.655.000		57.655.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)	4	1	50.000.000	1	57.655.000	1	57.655.000	1	57.655.000	1	57.655.000		
3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				115.000.000		59.517.500		59.017.500		59.517.500		59.517.500		
3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI				115.000.000		59.517.500		59.017.500		59.517.500		59.517.500		
Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi	Persentase transmigran yang tidak meninggalkan daerah penempatan (%)	100	100	115.000.000	100	59.517.500	100	59.017.500	100	59.517.500	100	59.517.500	3.31.3.32.2.07.11.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
3.32.03.2.01 - Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				115.000.000		59.517.500		59.017.500		59.517.500		59.517.500		
Terlaksananya Fasilitasi Penataan Persebaran Penduduk	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan (Kepala Keluarga)	2	2	115.000.000	2	59.517.500	2	59.017.500	2	59.517.500	2	59.517.500		
	Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal yang Mendapatkan Penyuluhan (Orang)	0	0		25		25		25		25			
	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan (Kepala Keluarga)	50	50		0		0		0		0			
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan	2	2		2		2		2		2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)													
	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Lokasi)	0	0		1		1		1		1			
3.32.03.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				50.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	2	2	50.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
3.32.03.2.01.0004 - Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				50.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
Terlaksananya Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan (Kepala Keluarga)	2	2	50.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000		
3.32.03.2.01.0005 - Penyuluhan Transmigrasi				15.000.000		0		0		0		0		
Terlaksananya Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan (Kepala Keluarga)	50	50	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.32.03.2.01.0010 - Penyuluhan Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal				0		4.517.500		4.017.500		4.517.500		4.517.500		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Penyuluhan Program Transmigrasi kepada Calon Transmigran Penduduk Asal	Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal yang Mendapatkan Penyuluhan (Orang)	0	0	0	25	4.517.500	25	4.017.500	25	4.517.500	25	4.517.500		
3.32.03.2.01.0020 - Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi				0		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Lokasi)	0	0	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		

4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

Sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah adalah langkah-langkah konkret dan terperinci yang diambil untuk mencapai tujuan yang lebih besar dari program prioritas tersebut. Sub kegiatan ini dirancang untuk menjabarkan secara lebih detail bagaimana program prioritas akan diwujudkan dan diukur keberhasilannya, dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya dan waktu

Dalam kurun waktu Tahun 2025-2029 pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek terdapat 6 (enam) Program yang menjadi Program Prioritas Pembangunan, yang didukung oleh 8 (delapan) Kegiatan dan 16 (enam belas) Sub Kegiatan. terlihat dalam tabel 4.4.1.

TABEL 4.4.1
Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
3.31.3.32.2.07.11.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA				
1.	2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Terkelolanya informasi tenaga kerja	2.07.02.2.01 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Mendukung TGX Kerja dengan proyek strategis Perluasan kesempatan kerja
			2.07.02.2.01.0001 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	
2.	2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	2.07.03.2.01 - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Mendukung TGX Kerja dengan proyek strategis Perluasan kesempatan kerja
			2.07.03.2.01.0001 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	
			2.07.03.2.01.0002 - Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	
			2.07.03.2.01.0003 - Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	
3.	2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	2.07.04.2.01 - Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Mendukung TGX Kerja dengan proyek strategis Perluasan kesempatan kerja
			2.07.04.2.01.0002 - Pelayanan antar Kerja	
			2.07.04.2.01.0003 - Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
			2.07.04.2.01.0004 - Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	
			2.07.04.2.01.0005 - Perluasan Kesempatan Kerja	
			2.07.04.2.03 - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	
			2.07.04.2.03.0003 - Job Fair/Bursa Kerja	
			2.07.04.2.04 - Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	
			2.07.04.2.04.0001 - Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	
			2.07.04.2.04.0003 - Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	
4.	2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	2.07.05.2.01 - Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Mendukung TGX Kerja dengan proyek strategis Peningkatan cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan
			2.07.05.2.01.0003 - Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	
5.	3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Meningkatnya realisasi pembangunan industri	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
			3.31.02.2.01.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Mendukung TGX Rantai Nilai dengan proyek strategis Hilirisasi produk pertanian, peternakan, perikanan

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
			3.31.02.2.01.0008 - Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	Mendukung TGX Halal dengan proyek strategis Higienis, Menguntungkan, Produk Lokal, Bersertifikasi Lengkap
6.	3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	3.31.03.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	
			3.31.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Mendukung TGX Investasi Hijau dengan proyek strategis Fasilitasi perijinan berusaha pertanian, perikanan, dan peternakan di OSS
			3.31.03.2.01.0004 - Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Mendukung TGX Ekonomi Karbon dengan proyek strategisPercepatan penyelenggaraan Nilai Ekonomi karbon (NEK) dan Mendukung TGX Investasi Hijau dengan proyek strategis Fasilitasi perijinan berusaha pertanian, perikanan, dan peternakan di OSS

Dalam tahun 2025-2029 Dinas Perindustrian juga memiliki 6 (enam) Program Prioritas (Bukan Nomenklatur Program) yaitu :

1. Program Kerja Ke Luar Negeri Biaya 0 Rupiah (KLN-0) dengan uraian program prioritas dan Target yang ingin dicapai yaitu Fasilitasi Pencaker bekerja ke LN, Kolaborasi Pemkab, LPK, P3MI dan Bank sebagai pembiayaan
2. Program Revitalisasi Pelatihan Vokasi melalui UPT BLK (Vivo - BLK) dengan uraian program prioritas dan Target yang ingin dicapai yaitu Meningkatkan jumlah dan kompetensi pencaker melalui pendidikan ketrampilan melalui UPT BLK
3. Program Kolaborasi UCJ Sosial Ketenagakerjaan (Kolaborasi UCJ - SOSTEK) dengan uraian program prioritas dan Target yang ingin dicapai yaitu Meningkatkan Universal Coverage Jaminan (UCJ) Sosial Ketenagakerjaan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya
4. Program Pelayanan CPMI Melalui Aplikasi Siap Kerja (CPMI - SIAP) dengan uraian program prioritas dan Target yang ingin dicapai yaitu Meningkatkan dan mendekatkan CPMI dalam pengurusan ID yang mudah dan cepat
5. Program Fasilitasi Layanan Standarisasi Industri (SILASTRI) dengan uraian program prioritas dan Target yang ingin dicapai yaitu Meningkatkan pelayanan fasilitasi standarisasi produk-produk Industri Kecil dan Menengah (IKM)
6. Program Konsultasi dan Pendampingan Industri Melalui SIINas (KOPI PANAS) dengan uraian program prioritas dan Target yang ingin dicapai yaitu Meningkatkan pelayanan konsultasi dan pendampingan kepada IKM dalam pengoptimalan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

TABEL 4.4.2

Program Prioritas Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek

No	Nama Program Prioritas (Bukan Nomenklatur Program)	Uraian program prioritas dan Target yang ingin dicapai	Tahun Pelaksanaan	Mendukung Misi)	Program Nomenklatur	Kegiatan Nomenklatur	Sub Kegiatan Nomenklatur
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Kerja Ke Luar Negeri Biaya 0 Rupiah **(KLN-0)**	Fasilitasi Pencaker bekerja ke LN, Kolaborasi Pemkab, LPK, P3MI dan Bank sebagai pembiayaan	2025 - 2029	4. Mewujudkan SDM yang sehat, kreatif dan berdaya saing	Penempatan Tenaga Kerja	Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten / Kota	Pelayanan antar Kerja
2	Program Revitalisasi Pelatihan Vokasi melalui UPT BLK **(Vivo - BLK)**	Meningkatkan jumlah dan kompetensi pencaker melalui pendidikan ketrampilan melalui UPT BLK	2025 - 2029	4. Mewujudkan SDM yang sehat, kreatif dan berdaya saing	Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
3	Program Kolaborasi UCJ Sosial Ketenagakerjaan **(Kolaborasi UCJ - SOSTEK)**	Meningkatkan Universal Coverage Jaminan (UCJ) Sosial Ketenagakerjaan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya	2025 - 2029	4. Mewujudkan SDM yang sehat, kreatif dan berdaya saing	Hubungan Industrial	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
4	Program Pelayanan CPMI Melalui Aplikasi Siap Kerja **(CPMI - SIAP)**	Meningkatkan dan mendekatkan CPMI dalam pengurusan ID yang mudah dan cepat	2025 - 2029	4. Mewujudkan SDM yang sehat, kreatif dan berdaya saing	Penempatan Tenaga Kerja	Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)

5	Program Fasilitasi Layanan Standarisasi Industri **(SILASTRI)**	Meningkatkan pelayanan fasilitasi standarisasi produk-produk Industri Kecil dan Menengah (IKM)	2025 - 2029	2. Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan regeneratif berbasis sumber daya unggulan daerah	Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di Level Kabupaten/ Kota
					Pengelolaan Sistem Industri Nasional	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
6	Program Konsultasi dan Pendampingan Industri Melalui SIINas **(KOPI PANAS)**	Meningkatkan pelayanan konsultasi dan pendampingan kepada IKM dalam pengoptimalan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	2025 - 2029	2. Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan regeneratif berbasis sumber daya unggulan daerah	Pengendalian Izin Usaha Industri	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Target keberhasilan Renstra Perangkat Daerah 2025-2029 diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. IKU berisi nilai-nilai terukur seperti kuantitas, kualitas, waktu, atau biaya yang digunakan untuk memantau sejauh mana program dan kegiatan dalam Renstra dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, sesuai dengan Permendagri No 86/2017 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan dan Evaluasi Kinerja Daerah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja dalam kurun waktu Renstra Tahun 2025-2029 adalah :

1. Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)
   Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang bekerja dengan jumlah angkatan kerja
2. Persentase pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM)
   Persentase pertumbuhan IKM dalam hal ini adalah peningkatan standarisasi produk industri kecil dan menengah (IKM)
3. Nilai rata-rata survey kepuasan Masyarakat
   Nilai rata-rata survey kepuasan masyarakat merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan masyarakat yang dihitung berdasarkan data survei.
4. Nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah
   Nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah, atau yang dikenal sebagai Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), adalah hasil evaluasi terhadap pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja di suatu instansi pemerintah, yang mencerminkan tingkat pertanggungjawaban kinerja dan pencapaian tujuan organisasi

TABEL 4.5.1 Indikator Kinerja Utama

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
1.	3.31.3.32.2.07.11.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA									
2.	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	%	96,10	96,13	96,15	96,17	96,19	96,21	96,23	
3.	Persentase pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM)	%	35,45%	8,49%	7,83%	7,26%	6,77%	6,34%	5,96%	
4	Nilai rata-rata survey kepuasan masyarakat (SKM)	Indeks	99,76	99,76	99,78	99,80	99,82	99,84	99,86	
5	Nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai	87,54	89,11	89,12	89,13	89,14	89,15	89,16	

4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk periode 2025-2029 ditentukan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai ukuran keberhasilan pencapaian urusan-urusan tersebut dalam sebuah dokumen perencanaan, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) atau Rencana Strategis (Renstra). IKK adalah alat yang digunakan untuk mengukur sejauh mana urusan pemerintahan daerah berhasil diselenggarakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. IKK ini menggambarkan kinerja spesifik dari urusan pemerintahan daerah, yang membantu memastikan bahwa urusan-urusan tersebut dijalankan secara efektif untuk mencapai tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan

Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam kurun waktu Renstra Tahun 2025-2029 adalah :

1. Tingkat produktivitas tenaga kerja
   Merupakan perbandingan antara Jumlah keseluruhan PDRB (atas dasar harga konstan dalam satuan rupiah utuh) kabupaten/kota pada tahun pelaporan dengan jumlah keseluruhan tenaga kerja laki-laki dan wanita pada sektor formal maupun informal di wilayah kabupaten/kota
2. Rasio PDRB Industri Pengolahan
   Proporsi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor Industri Pengolahan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap PDRB
3. Persentase transmigran yang tidak meninggalkan daerah penempatan
   Rasio transmigran yang tidak meninggalkan daerah penempatan terhadap jumlah transmigran yag ditempatkan sesuai kuota

TABEL 4.6.1 Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
1.	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA										
2.	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	positif	Rupiah/ Kapita	32.066.846,38	32.176.221	32.193.628	32.210.046	32.225.556	32.240.232	32.254.138	
3.	3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN										
4.	Rasio PDRB Industri Pengolahan	positif	%	19,42	19,43	19,45	19,46	19,47	19,49	19,50	
5.	3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI										
6.	Persentase transmigran yang tidak meninggalkan daerah penempatan	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2025-2029 menyajikan agenda perencanaaan pembangunan untuk mengantisipasi masalah dan kendala pembangunan yang belum sepenuhnya tertangani pada dokumen sebelumnya, dan perubahan lingkungan strategis yang diperkirakan akan timbul pada lima tahun berikutnya.

Pada Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2025- 2029 telah menetapkan tujuan, sasaran, kebijakan dan Program Kegiatan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas, standar pelayanan minimal dan merupakan penjabaran visi dan misi pengembangan bidang urusan yang diampu oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja serta penjabaran visi dan misi Kepala Daerah terpilih.

Demikian gambaran singkat tentang Rencana Strategis Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek, dengan tersusunnya Rencana Strategis ini, diharapkan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana sehingga tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan dapat tercapai.

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SRI AGUSTIANI
NIP. 19671223 199203 2 004

PEMERINTAH
KABUPATEN
TRENGGALEK

